



LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN III

BINMAS - SEKSI KEWASPADAAN DINI



Disusun oleh:

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

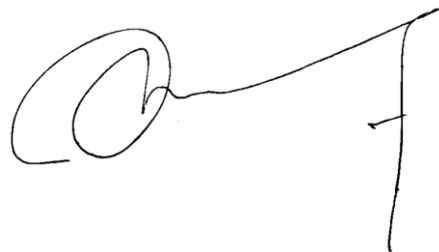
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan III ini yang berjudul “Laporan Triwulan III Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi T.A 2026” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi di bidang Pembinaan Masyarakat selama Triwulan III. Laporan Triwulan disusun sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan Triwulan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di masa yang akan datang.

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,



IMAM ASROPI, SKM, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19710913 199403 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan	4
1.4 Anggaran.....	5
BAB II PELAKSANAAN.....	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	104
BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN.....	105
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	105
3.2 Kendala dan Solusi.....	106
BAB IV PENUTUP.....	107
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun 2026 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu :
- 1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan Usaha;
 - 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

1.4 Anggaran

Pagu anggaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 173.920.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	1.05.	02.1.	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	173.920.700,-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dok

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan III (Juli – September) Tahun Anggaran 2026, yaitu :

A. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Ganggguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Aksi Unjuk Rasa dari Elemen Masyarakat, Berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1204 / SATPOL.PP tanggal 07 Juli 2026, Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar Terkait Pemadaman Listrik di Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 7 Juli 2026 di mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

3. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plh Kepala Seksi Kewaspadaan Dini - YA' HERYANTO, S.H dan sebagai koordinator yaitu dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Temuan di Lapangan

Pada hari selasa tgl 7 juli Solmadapar melakukan aksi unjuk rasa di PLN UID di Jl Adisucipto

Alat peraga antara lain

1. Bendera
2. Spanduk
3. Toa
4. Poster

Adapun hal2 yg dilaporkan sbg berikut :

1. Pada pukul 15:05 masa dari solmadapar berjumlah 12 orang bergerak ke PLN UID di Jl Adis longmarch mendapat pengawalan dari pihak kepolisian
2. Pada pukul 15:20 masa tiba di PLN UID Jl Adisucipto masa mengkritik terhadap pemadaman listrik yg tidak berkesudahan dimana kita ketahui kalimantan merupakan lumbung batubara, masa mempertanyakan terkait kompensasi terhadap pemadaman listrik.
3. Pada pukul 15:35 perwakilan dari pln menemui masa.

Bapak Salmon Kareth Insinyur manajer distribusi uid pln adis

Disampaikan bahwa kejadian ini memang diluar kendali dan bukan kemauan kita semua, dijelaskan ada kendala teknis dimana pemeliharaan diperlukan dalam kurun waktu 10 hari terhitung dari tgl 2 dan disampaikan tgl 11 juli diharapkan suplay listrik sudah kembali normal perbaikan sudah dilakukan oleh tim dari pln 1x24 jam.

Bapak Mukhlis Zarkasih Manager komunikasi uid pln adis

Dikatakan gangguan karena bocor nya pipa boiler sehingga dilakukan emergency stop, pln terpaksa melakukan pemadaman bergilir utk mengantisipasi blackout di kalimantan barat upaya sudah dilakukan dengan perbaikan dipercepat terhadap alat dan dinyatakan sudah

70% perbaikan telah diselesaikan diinfokan terkait kompensasi yang diminta masa semua berdasarkan keputusan pusat.

Masa mengkritik terkait himbauan dari pln dimana dalam kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan jadwal yg diedarkan oleh tim pln, masa mengkritisi kinerja dari divisi engginer dimana pemeliharaan seharusnya kejadian kebocoran pipa boiler bisa dicegah dari awal apabila peremajaan alat itu rutin dilakukan 5 tahun sekali masa juga mengkritisi permen esdm no 2 tahun 2025 terkait hak perlindungan konsumen dimana pln kalbar tidak bisa memberikan statement dan melempar keputusan kepusat.

4. Pada pukul 16:15 masa membubarkan diri dengan tertib mendapatkan pengawalan dari kepolisian.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1204 / SATPOL.PP tanggal 07 Juli 2026, Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar Terkait Pemadaman Listrik di Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 8 Juli 2026 di mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

3. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plh Kepala Seksi Kewaspadaan Dini - YA' HERYANTO, S.H dan sebagai koordinator yaitu dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Temuan di Lapangan

Massa dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai respons atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan sikap dan aksinya di Kantor PLN Kalbar, BPM menilai gangguan pasokan listrik telah mengganggu aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik. Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, sebelumnya menyatakan pihaknya akan mengerahkan sekitar 1.000 peserta aksi untuk menyuarkan berbagai tuntutan kepada PT PLN (Persero) dan pemerintah.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan BPM adalah penghentian pemadaman bergilir serta pemulihan pasokan listrik secara penuh di seluruh wilayah Kalimantan Barat. "Hentikan pemadaman brutal dan segera pulihkan pasokan listrik secara total di seluruh wilayah Kalimantan Barat tanpa alasan penundaan," demikian salah satu poin tuntutan BPM.

Selain mendesak normalisasi pasokan listrik, BPM juga meminta agar masyarakat tidak dibebani dampak finansial akibat gangguan layanan yang terjadi. Menurut BPM, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan akibat menurunnya daya beli. Karena itu, mereka menolak apabila kerugian operasional maupun persoalan internal perusahaan listrik dibebankan kepada pelanggan. BPM juga menuntut PLN memberikan kompensasi nyata kepada pelanggan yang terdampak pemadaman berkepanjangan. Bentuk kompensasi yang dimaksud antara lain berupa pembebasan biaya beban, potongan tarif listrik, hingga penggantian kerusakan peralatan elektronik milik warga dan pelaku usaha. Mereka menilai pemadaman yang terjadi telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang kaki lima, warung kopi, dan usaha rumahan yang bergantung pada listrik untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Selain persoalan kompensasi, BPM juga meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab gangguan kelistrikan yang terjadi.

Mereka menuntut adanya publikasi terbuka dan bertanggung jawab terkait mekanisme kompensasi pelanggan serta perkembangan proses pemulihan sistem kelistrikan. BPM turut mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap jajaran pimpinan PLN Kalimantan Barat. Tak hanya itu, organisasi kepemudaan tersebut juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen komunikasi PLN Unit Induk Distribusi (UID)

Kalimantan Barat. Dalam pernyataannya, BPM juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Mereka meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan penyelidikan menyeluruh terkait penyebab pemadaman listrik yang terjadi. "Kami akan melaporkan kepada APH apabila menemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan kelistrikan di Kalimantan Barat," tulis BPM.

Selain itu, mereka menekankan pentingnya jaminan pasokan listrik tanpa gangguan bagi sektor-sektor vital seperti rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, dan instalasi pengolahan air bersih. BPM menilai keberlangsungan layanan publik tersebut tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Pada pukul 16:15 masa membubarkan diri dengan tertib mendapatkan pengawalan dari kepolisian

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1293 / SATPOL.PP tanggal 24 Juli 2026, Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Persatuan Supir Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 8 Juli 2026 di mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Aksi "Persatuan Sopir Kalimantan Barat " BBM 27 Juli 26

Pada hari Senin tgl 27 Juni 2026 telah dilaksanakan aksi massa yang tergabung dalam "Persatuan sopir Kalimantan barat" yang merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya pernah

dilakukan di tugu Ambawang alianyang. Massa aksi yang berjumlah +- 50 Orang berkumpul di jalan sultan Hamid II , tepatnya dibawah tol landak Kapuas, dalam aksi tersebut massa membawa 24 Truk, 3 mobil pribadi dan beberapa kendaraan bermotor menuju kantor Gubernur Kalimantan Barat pada pukul 8.45. Dalam aksinya massa membawa puluhan poster dan Soundsistem.

Massa sampai di kantor Gubernur Kalbar pada pukul 9.40 diterima oleh : Gubernur Kalbar bapak Ria Norsan, perwakilan dari Pertamina, Kapolresta Pontianak, Iswara migas, Organda Agus, polda Kalbar Kombes maradianto, asisten 1 Antonius rawing, kadis dinas perhubungan provinsi kalbar Hermanus, Kabir perekonomian, hari, biro Hukum., dan kasat Pol PP., Asisten perekonomian dan pembangunan, Dinas SDM Syarif Kamaruzzaman untuk melakukan audiensi di ruang kerja Gubernur Kalbar.

Korlap : Mulyono, M.Ali Kab mempawah sebagai korlap provinsi, bg Anto dari Sambas, Singkawang, Sdr Basri, Umar Faruk mempawah, Sanggau Kapuas bang Arifin, Sekadau Dedi dan libertus Toni, kan Melawi bang bay, Sintang bang faki, Putussibau bang Fauzi, landak bang Rohmat, Kayong Utara bang indra, Ketapang bang taki, kubu raya bang maswin, Bengkayang Dedi Irawan, kota Pontianak bang Antoni.

Adapun beberapa point tuntutan dari massa antara lain

9 TUNTUTAN KAMI

- 1.Realisasikan janji penyelesaian kelangkaan solar bersubsidi di Kalimantan Barat.
- 2.Bentuk Tim Terpadu Pengawasan Distribusi BBM yang melibatkan perwakilan sopir.
- 3.Tindak tegas SPBU, pelangsir, dan seluruh pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4. Usut tuntas oknum aparat, pengelola SPBU, maupun pihak lain yang terlibat mafia BBM.
5. Menjamin ketersediaan solar subsidi bagi kendaraan angkutan yang berhak.
6. Wujudkan distribusi BBM yang mudah, adil, transparan, tepat sasaran, dan bebas percaloan.
7. Laksanakan pengawasan berkelanjutan serta sampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
8. Berikan kepastian waktu dan langkah nyata dalam menyelesaikan seluruh tuntutan.
9. Apabila tidak ada penyelesaian yang nyata, kami akan melaksanakan aksi lanjutan secara damai sesuai ketentuan yang berlaku hingga diperoleh penyelesaian yang benar-benar dapat berdampak pada supir angkutan di provinsi Kalimantan barat.

Dalam audiensi massa menyuarakan bahwa sampai sekarang setelah dilakukan demo beberapa kali belum ada penindakan dan bahkan semakin parah sehingga mereka merasa semakin susah dalam mendapatkan BBM subsidi jenis Solar, mereka meminta Gubernur Kalbar untuk dapat menyelesaikan masalah BBM yang ada di provinsi Kalimantan barat. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka meminta pertanggungjawaban terkait permainan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menyelewengkan BBM Subsidi yang merugikan supir-supir yang benar-benar mencari nafkah, dan ini merupakan agenda yang sudah bertahun-tahun yang belum terselesaikan. Mereka juga menyinggung terkait adanya kendaraan-kendaraannya yang di prioritaskan dalam mendapatkan BBM bersubsidi dan meminta keadilan dalam pengisian BBM bersubsidi. Mereka juga menyinggung SPBU air hitam dan Peniti yang secara terang-terangan melakukan penyelewengan BBM subsidi.

Dalam audiensi tersebut Gubernur Kalimantan barat menyuarakan bahwa kelangkaan ini bukan langka karena kuota namun adanya Oknum-oknum yang menjual Minyak subsidi ini ke Pihak-pihak yang seharusnya tidak menggunakan BBM subsidi dan juga untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. Gubernur menekankan bahwa pertamina butuh pengawasan extra terkait distribusi BBM yang belum berjalan dengan baik. Sebab dalam hal ini pihak Pertamina dan juga ApH yang memiliki peran dan kewenangan untuk melakukan penindakan.

Dari pihak Pertamina Patra niaga kalbar menyampaikan bahwa di Kalbar selain Pertamina ada Badan usaha lain yg mendistribusikan BBM solar, namun tetap mayoritas di pegang oleh Pertamina. Dimana kuota khusus untuk Kalimantan barat sudah cukup dan sesuai untuk Kalimantan barat dari sisi supply sudah sangat cukup namun mmg pengawasan yang masih belum maksimal khususnya untuk BBM jenis solar ini., Pertamina sendiri sudah melakukan penindakan ke SPBU2 yang nakal, baik dari teguran dan juga administratif, seperti pemblokiran barcode dll, untuk saat ini memang sudah ada beberapa SpBU yang di block untuk dilakukan pembinaan seperti di Sanggau dan Ketapang. Mereka meminta kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna BBM bersubsidi untuk dapat melaporkan jika adanya penyimpangan agar pihak Pertamina dapat melakukan penindakan.

Penjelasan dari Polda Kalbar terkait kelangkaan ini dimana mereka menyadari adanya celah-celah ekonomi yang memanfaatkan demi kepentingan pribadi, dimana polri juga sudah melakukan himbauan dan juga pembinaan, polri juga siap dalam melakukan penegakan hukum jika mmg pembinaan dan himbauan ini tidak juga mmbuahkan hasil maka pihak polri akan melakukan tindakan yang terukur.

Dalam diskusi ini terdapat point penting bahwa Terdapat SPBU-SPBU yang menjual BBM bersubsidi dengan menjual harga diatas

HET, dimana harga normal 6.800 namun di lapangan mereka menjual di harga 14.000, adapun Spbu yang dapat menjadi perhatian antara lain SPBU telabang Sanggau dan Tanjung sosok, SPBU air Hitam, SPBU peniti, SPBU Pemangkat dan Bengkayang berdasarkan informasi ini pihak Pertamina akan meindak tegas SPBU-SPBU yang bermasalah tersebut. Pihak Gubernur meminta pihak pertamina untuk dapat mengundang seluruh Pengusaha SPBU dan dapat merumuskan masalah yang sedang di hadapi para supir agar permasalahan ini segera dapat teratasi, serta meminta para APH menjaga komitmen untuk dapat menyelesaikan oknum-oknum yang membekengi kegiatan -kegiatan penyelewengan ini.

Audiensi ini selesai pada pukul 13.19 dalam keadaan Kondusif dan Lancar.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1478 / SATPOL.PP tanggal 26 Agustus 2026, Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh BPM dan Aliansi Mahasiswa di Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 26 Agustus 2026 di mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

UNRAS BPM kalbar

Aksi UNRAS BPM (Barisan Pemuda Melayu) Kalbar 26 Agustus 2026.

Titik kumpul masjid raya Mujahidin dengan tujuan kejaksan tinggi Kalbar.

Adapun jumlah massa +- 200 orang dengan Korlap Sdr. Gusti Edi Atribut Yang digunakan 1 Mobil Komando, 4 Pickup, bendera BPM, poster , 1 mobil pribadi, Toa.

Massa bergerak pada pukul 13.35 dari masjid Mujahidin Pontianak dan tiba ke kejaksan pada pukul 13.45

Massa dari BPM menuntut untuk:

1. Hentikan Pemborosan Anggaran Daerah terkait pembangunan lahan Parkir di KAJATI KAL-BAR

- Evaluasi KAJATI KAL-BAR dan ASINTELJEN KEJATI KAL-BAR
- Usut Tuntas Dana HIBAH Rp. 19,1 Miliar
- KPK Turun ke Kalimantan Barat
- JAMWAS KEJAKSAAN AGUNG Harus ambil peran

2. Audit ANGGARAN KARHUTLA 2026

- Transparansi Anggaran untuk penanggulangan KARHUTLA
- Audit menyeluruh Penggunaan uang Negara 2026
- Penegakan Hukum tegas tanpa tebang pilih
- Selamatkan Hutan selamatkan Masa Depan

Selain itu Korlap Gusti Edi menyatakan.

- a.) Semua yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat ini karena masih banyak media media Bodrex yang membuat perkeruh suasana.
- b.) Masih banyak oknum oknum yang masih ada yang membuat masyarakat selalu resah karena informasi yang masih belum akurat
- c.) Semua elemen pemerintah harus bisa menjaga wilayah Kalimantan Barat dengan baik dan tidak ada lagi tebang pilih terkait hal hal yang dpat membuat masyarakat tidak suka dengan pemerintah

Dalam aksinya Massa Unras diterima oleh Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Menurutnya terkait Dana hibah bahwa kejaksaan memang pernah mengajukan dana hibah ke Pemprov 3 tahun yg lalu dan sudah sesuai aturan dari kejaksaan namun baru pada tahun ini dapat terealisasi, menurut pihak kejaksaan dan telah dikoordinasikan ke pemprov Kalbar bahwa anggaran ini akan dikembalikan lagi kebijakannya ke Pemprov Kalbar untuk kepentingan masyarakat. Anggaran saat ini masih di Pemda dan dari pihak kejaksaan kembali meminta ke Pemda untuk menggunakan anggaran tersebut dikembalikan lagi ke Pemprov untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam program program yang mendukung pembangunan Kalbar. Jadi pihak kejaksaan tidak ada lagi kepentingan terkait Anggaran dana hibah tersebut. Dan pihak kejaksaan memastikan tidak akan menerima dana hibah tersebut.

Unras selesai pukul 14:32 dengan aman dan tertib.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1490 / SATPOL.PP tanggal 27 Agustus 2026, Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat di Kantor DPRD Prov Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 26 Agustus 2026 di mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Aliansi Selamatkan Kalbar

Pada hari Kamis, 27 Agustus 2026 dilakukan audiensi oleh gabungan masyarakat dan mahasiswa dengan anggota DPRD Prov Kalbar.

Adapun hal2 yg dilaporkan sbg berikut :

1. Pada pukul 16:00 masa tiba dikantor DPRD Prov Kalbar dan disambut untuk melakukan audiensi di aula.

Di Aula Masa ditemui oleh :

Aloysius Ketua DPRD

Agus Darmansyah Ketua Fraksi PDI

M. Darwis Komisi IV PDI

Zulfidar Komisi I PAN

Jeffay Edward PDIP

Endang Tri Kapolresta Pontianak Kota

2. Orasi yg dilakukan oleh mahasiswa

- Oki selaku korlap menyatakan telah membuat posko bantuan di bundaran digulis untan dan menyatakan pengajuan permohonan kolaborasi atau bantuan utk optimalisasi usaha dari teman aliansi.

- Syarif Falmu mengkritik terkait DBH yg tidak sesuai dalam beberapa seremonial, dan mengkritik terkait lokasi konsisi dimana pembakaran terjadi di lokasi perkebunan sawit yg mana masyarakat kalbar hanya menerima dampak tanpa menikmati pajak ataupun kesejahteraan dari perkebunan sawit.

Terkait UU No 1 Th 2022 diperintahkan utk dihapus oleh Presiden dan menjadi sorotan bahwa nenek moyang telah melakukan metode pembakaran lahan dari dulu dan berdasarkan data terbaru dari tahun ke tahun luas dan dampak dari pembakaran terus meningkat.

- Syarif Hidayatullah juga mengkritisi terkait hibah dengan nilai fantastis yg diberikan oleh Pemda yg dimana daerah lebih membutuhkan dan tidak ada urgensi nya terkait lahan parkir di kejati

2. Tanggapan Anggota DPRD

- Berdasarkan kondisi dilapangan terkhusus di wilayah simpang yg warga masih melakukan pembakaran utk membuka lahan dibuatlah Perda no 1 Thn 2022 sebagai pelindung utk masyarakat adat, disampaikan dari DPRD akan berusaha utk mempertahankan Perda tsb namun akan dibicarakan terkait pelaksanaan pembakaran tsb dengan kordinasi ke aparat desa atau dilakukan pembagian waktu pembakaran serta pengawasan khusus pelaksanaan nya utk kepentingan pembukaan lahan oleh masyarakat.

- Disampaikan oleh DPRD akan dilakukan pertemuan dengan OPD sesuai leading sector dan akan melibatkan mahasiswa utk diberikan kesempatan utk menyampaikan kajian sehingga terjalin sinergi utk membantu pengembangan kinerja dari anggota DPRD sendiri

- Akan dilaksanakan pertemuan dengan Pemprov serta pihak perusahaan yg akan membahas aturan DBH ataupun dana CSR utk dilakukan pengkajian aturan di tahun 2027 yg akan melibatkan mahasiswa

Pada pukul 17:34 Audiensi selesai, masa meninggalkan ruangan dengan tertib dan aman.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1526 / SATPOL.PP tanggal 3 September 2026, Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Fomda di Bandara Supadio Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 26 Agustus 2026 di mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Kubu Raya, Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Se-Kalimantan Barat dan Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalbar menggelar aksi di pintu masuk Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis 3 September 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak di Kalimantan Barat. Mereka juga menyatakan penolakan terhadap rencana kedatangan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni ke Kalbar. Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Okky Ramadani, Ketua DPM Universitas Tanjungpura sekaligus Sekretaris Pusat FOMDA Kalbar. Polres Kubu Raya mengerahkan 76 personel untuk mengamankan kegiatan. Pengamanan dilakukan guna memastikan penyampaian pendapat berlangsung tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jasa Bandara Internasional Supadio.

Massa Aksi membawa sejumlah atribut, di antaranya pengeras suara, bendera FOMDA Kalbar, dan spanduk bertuliskan "Kami Butuh Solusi, Bukan Kunjungan Seremonial." Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan orasi dan meminta diberikan ruang untuk menyampaikan pernyataan serta tuntutan mereka secara langsung. "Kami dari Ketua BEM hanya ingin menyampaikan izin untuk masuk ke dalam. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan kami secara langsung," ujar salah satu peserta aksi. Mahasiswa juga menyatakan akan menggalang massa lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak memperoleh jawaban.

"Apabila hari ini tuntutan kami tidak mendapatkan jawaban, jangan salahkan kami apabila ke depannya kami akan membawa massa yang lebih banyak untuk menyampaikan aspirasi kami," kata peserta aksi lainnya. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan kemudian menemui mahasiswa di lokasi aksi. Di hadapan massa, Ria Norsan menjelaskan bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan datang ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, agenda tersebut terkendala kondisi kabut asap. Berdasarkan laporan pada Kamis 3 September 2026, pesawat yang membawa Menteri Kehutanan bersama rombongan mengalami keterlambatan karena jarak pandang.

Ria Norsan meminta mahasiswa menunggu informasi lebih lanjut mengenai kepastian agenda Menteri Kehutanan di Kalimantan Barat. Ia juga mengimbau mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan damai serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kepentingan umum maupun aktivitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata Ria Norsan, terbuka terhadap kritik dan masukan mahasiswa, termasuk aspirasi mengenai penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap. FOMDA Kalbar menyatakan keprihatinan terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Mahasiswa menilai pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, perlu menghadirkan langkah mitigasi dan penanganan yang konkret. "Kami berharap kedatangan Menteri Kehutanan benar-benar membawa solusi konkret bagi penanganan dan mitigasi karhutla, bukan hanya sekadar melakukan kegiatan seremonial," tegas massa aksi. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal persoalan karhutla serta mengonsolidasikan aspirasi hingga tingkat pusat. Menurut mereka, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas udara, aktivitas masyarakat, perekonomian, dan kehidupan sehari-hari.

Tiga Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, FOMDA Kalbar menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.

Pertama, mahasiswa meminta Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.

Kedua, mereka meminta Menteri Kehutanan memberikan solusi konkret untuk mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang mereka nilai lalai dan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pengawasan lahan.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 300.1 / 1620 / SATPOL.PP tanggal 24 September 2026, Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar dan SPI Dalam Memperingati Hari Tani di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalbar.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 24 September 2026 di mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Solmadapar & Serikat Petani Indonesia

Pada hari kamis tgl 24 September dilakukan aksi unras oleh solmadapar dan serikat petani indonesia dengan jumlah masa ± 50 orang

Adapun hal2 yg dilaporkan sbg berikut.

1. Alat peraga antara lain

- Mobil Pickup
- Toa
- Bendera
- Poster
- Ban

2. Masa ditemui oleh

Bapak Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si Wagub Kalbar

Bapak Hendra, S. Sos. Pj Sekda Kalbar

Bapak Suherman, S.H. M. H Kasatpol PP Prov Kalbar

Bapak Mujahidin Ma'ruf Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat

Bapak Rino Anteno Tengo, S.STP., M.Si Plt Kadisbunak

Ibu Ir. Herti Herawati, MMA. Kadis Ketahanan Pangan

3. Pada pukul 13:55 masa tiba dikantor gubernur melakukan orasi dihalaman kantor gubernur

Poin-Poin Utama Tuntutan:

1. Penyelesaian Konflik Agraria & Lahan Objek Reforma Agraria (TORA)

a. Kabupaten Melawi:

- Laman Bukit vs PT. Rafi Kamajaya Abadi (luas 601 Ha; meminta ganti rugi tanam tumbuh petani mandiri yang terbakar).
- Batu Nanta vs PT. Rafi Kamajaya Abadi (luas 415 Ha).

- Tekaban vs PT. Sinar Dinamika Kapuas – PT. KSP Agro (HGU habis Maret 2030, luas 544,4 Ha; meminta ganti rugi tanam tumbuh petani mandiri).

b. Kabupaten Sintang:

- Rarai vs PT. Sinar Dinamika Kapuas – PT. KSP Agro (luas 637,7 Ha).

- Riam Kijang-Lebak Ubah vs PT. Sinar Dinamika Kapuas – PT. KSP Agro (luas 601 Ha).

c. Kapuas Hulu:

- Semangut Utara vs PT. Batu Rijal Perkasa (lahan petani masuk HGU, luas 509 Ha).

- Jaras vs PT. Borneo Internasional Anugerah (tanah adat masuk HGU, luas 540 Ha).

- Sungai Uluk vs PT. Borneo Internasional Anugerah

2. Perlindungan Hukum: Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani anggota SPI yang berkonflik di Kalimantan Barat.

3. Penghentian Kriminalisasi: Menghentikan segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta petani anggota SPI.

4. Keterlibatan Kelembagaan (GTRA): Memasukkan Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Barat ke dalam keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023 sebagai mitra strategis ATR/BPN tingkat provinsi.

5. Reforma Agraria Sejati: Melaksanakan reforma agraria sejati demi mewujudkan masyarakat adat dan petani yang adil dan makmur.

6. Payung Hukum Daerah: Membuat Peraturan Daerah (Perda) Pengaturan Reforma Agraria yang berpihak pada masyarakat adat dan petani di Kalimantan Barat.

7. Penghentian Deforestasi: Menghentikan deforestasi masif yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekologis.

8. Pencabutan Izin Konsesi Kerhutla: Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) akibat Karhutla di

Kalimantan Barat yang berada di area konsesi, serta mendistribusikan tanah tersebut kepada masyarakat adat/petani.

9. Hak Atas Tanah: Menegaskan bahwa tanah diperuntukkan bagi masyarakat adat dan petani Kalimantan Barat, bukan untuk korporasi.

a. Disampaikan oleh Bapak Sujono Sekertaris Desa Tekaban, Melawi terkait aksi masa meminta utk dihadirkan gubernur ataupun wakil gubernur dimana aksi yg sama dipusat oleh Bapak Hendra Saragih selaku ketua SPI pusat ditemui langsung oleh Presiden terkait perijinan usaha PT SDK (Sinar Dinamika Kapuas) diminta utk mencabut ijinnya dikarenakan masyarakat terkena dampak dari pembakaran hutan yang merambah sampai perkebunan warga dimana tidak ada upaya dari perusahaan utk memadamkan api tsb

Masa mengkritisi pemerintah utk merevisi pemberian HGU dimana berdasarkan fakta dilapangan banyak tanah masyarakat adat diberikan ke perusahaan dan terdapat 5 pencabutan izin usaha namun tidak ada PT SDK masa menuntut perijinan terhadap perusahaan tsb dan mengembalikan hak guna nya kepetani di Tekaban

b. Disampaikan oleh Bapak Sekda bahwa Gubernur perjalanan dinas ke jakarta menghadiri pemberian penghargaan sehingga tidak bisa hadir.

c. Tanggapan oleh Kanwil BPN Kalbar berjanji akan melakukan survei dilapangan terkait HGU yg menyerobot tanah masyarakat dan akan melibatkan peserta aksi

d. Disampaikan oleh Bapak Wagub bahwa pihak provinsi mengajak Atr/Prov utk kolaborasi mengembalikan tanah adat, tanah masyarakat, dan kuburan yg di berikan HGU ke perusahaan dan akan mendorong pemuatan Perda terkait Agraria dan Hukum Adat

4. Pada pukul 15:30 solmadapar meninggalkan kantor gubernur dan pukul 16:00 audiensi selesai

B. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Di Lokasi Atau Aset Milik Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1230 / SATPOL.PP tanggal 13 Juli 2026, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pengesahan PSHT di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 13 Juli 2026 di mulai pukul 19.00 WIB di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya' Heryanto. S,H.

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Pada hari Senin, Tanggal 13 Juli 2027 dilakukan Upacara sakral Pengesahan Warga Baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Provinsi Kalimantan Barat kerap diselenggarakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Acara ini berlangsung di bawah naungan induk organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kalimantan Barat untuk memperkuat persaudaraan dan melestarikan budaya pencak silat. Lokasi acara pengukuhan dilakukan di Pendopo Gubernur Kalimantan

Barat Acara pengesahan dihadiri oleh jajaran pengurus IPSI Kalbar serta tokoh lintas perguruan silat (seperti perwakilan PERSINAS ASAD) sebagai simbol soliditas dan silaturahmi. Kepengurusan IPSI Kalimantan Barat saat ini diketuai oleh Alexander Wilyo, yang terus mendorong pencak silat sebagai wadah prestasi dan pelestarian budaya. Dalam pelaksanaan pengukuhan yang dijadwalkan dihadiri oleh Bapak Gubernur diwakili oleh Plt. Kadis Pendidikan Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, S.STP., M. M dalam pelaksanaannya dihadiri kurang lebih 800 anggota perguruan pencak silat setia hati.

Dimana dalam hal ini disampaikan bahwa pencak silat bukan hanya olahraga, tetapi juga warisan budaya dan identitas bangsa. Karena itu, keberadaannya harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Pemerintah Provinsi Kalbar juga mendorong IPSI untuk mendukung pengembangan sport tourism dan industri olahraga yang diharapkan mampu membuka peluang pariwisata, menggerakkan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara pengukuhan berjalan lancar sesuai rencana dan tidak ditemukan adanya kendala atau hambatan selama acara berlangsung.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1256 / SATPOL.PP tanggal 16 Juli 2026, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2026 Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Basudara Maluku Kalimantan Barat Masa Bhakti 2026 – 2031 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 16 Juli 2026 di mulai pukul 18.00 WIB di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya’ Heryanto. S,H.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Basudara Maluku Kalbar, Organisasi ini bernaung di bawah Perkumpulan Merah Putih (PMP) Kalbar dan aktif mengadakan kegiatan pelestarian budaya, seperti perayaan HUT Kapitan Pattimura dan Festival Budaya Maluku, termasuk kiprahnya di wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas (Singbebas). Ketua Perkumpulan Basudara Maluku Kalbar, Nikolas Raffel Kilikily mengatakan, perkumpulan ini menjadi wadah berkumpulnya warga dari Pulau Maluku di Kalbar. Dalam waktu dekat para pengurus akan membuat program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Rencana yang paling urgen sesuai AD/ART adalah kami akan membentuk DPD kabupaten kota di Kalbar.

Perkumpulan Basudara Maluku di daerah sudah menunggu kedatangan kami dalam rangka melantik mereka sebagai pengurus daerah,” ungkapnya. Program lainnya, kata dia, adalah pagelaran seni budaya yang bersinergi dengan organisasi kebudayaan lainnya di Kalbar. Kegiatan bersama ini menjadi momentum untuk meningkatkan rasa persatuan antaretnis dan budaya. “Kami juga sedang berkoordinasi dan berusaha untuk mendata warga Maluku di Kalbar sehingga diketahui jumlah pastinya. Saat ini ada 4000 orang yang terdata, tetapi data selengkapnya akan kami lakukan validasi,” tutupnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar, Hermanus, mengucapkan selamat atas dilantiknya Perkumpulan Basudara Maluku di Kalbar. Menurutnya, organisasi masyarakat dapat memberikan andil besar dalam bangsa mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perkumpulan Basudara Maluku di Kalbar dapat memberikan nilai lebih dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudi luhur. “Perkumpulan Basudara Maluku dan organisasi masyarakat lainnya,

diharapkan dapat secara luwes dan sejajar dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.

Perkumpulan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan dan menjaga persatuan dan toleransi di Kalbar. Selain itu, melalui wadah ini pula, dapat mendukung pembangunan daerah. Perkumpulan Basudara Maluku adalah bagian dari Perkumpulan Merah Putih (PMP) Kalimantan Barat yang baru saja dikukuhkan oleh Gubernur Kalbar beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan PMP, Burhan berharap, seluruh organisasi budaya dan etnis dapat saling bersinergi mendorong kerukunan dan pembangunan. “PMP menjadi wadah bagi 22 etnis di Kalbar, termasuk etnis Maluku. PMP berharap agar seluruh organisasi mampu memperkuat persatuan antar etnis tanpa memandang ras dan agama. Kita adalah satu dalam bingkai NKRI

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1296 / SATPOL.PP tanggal 25 Juli 2026, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2026 Dalam Rangka Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 25 Juli 2026 di mulai pukul 06.00 WIB di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya’ Heryanto. S,H.

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, membuka Kegiatan Pengembangan Kompetensi JPT Pratama 2026 yang diikuti 50 kepala perangkat daerah sebagai upaya memperkuat kepemimpinan strategis dan transformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Kalbar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi pejabat tinggi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 yang diikuti oleh 50 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Strategis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Menuju Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”, sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan pengembangan kompetensi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Windy, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pelatihan rutin, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat karakter kepemimpinan para pejabat tinggi pratama agar mampu membawa perubahan positif di lingkungan birokrasi. “Pengembangan kompetensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter kepemimpinan, meningkatkan integritas, serta membangun sinergi yang lebih kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya, Minggu (26/7/2026). Ia menjelaskan, para kepala perangkat daerah memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan dinilai sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan manajerial, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk

memperkuat integritas, disiplin, profesionalisme, serta membangun semangat korps Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan. Windy menegaskan bahwa seorang Pejabat Pimpinan Tinggi tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin perubahan yang membangun budaya kerja, menggerakkan organisasi, serta menjadi teladan bagi seluruh aparatur. “Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Kepemimpinan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar simbol kehormatan,” tegasnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mendapatkan berbagai materi strategis, diskusi kelompok, latihan kepemimpinan, hingga kegiatan team building yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antarpimpinan perangkat daerah. Melalui pendekatan tersebut, BPSDM Kalbar berharap mampu menghilangkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan saling mendukung. Windy menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan ditentukan oleh kemampuan seluruh perangkat daerah untuk bekerja sebagai satu tim yang solid. “Kemajuan Kalimantan Barat hanya dapat dicapai apabila seluruh perangkat daerah mampu bersinergi, saling menguatkan, dan bergerak bersama menuju tujuan pembangunan yang sama,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi strategis, adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam memberikan pelayanan publik, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas kepemimpinan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis transformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat sehingga pelayanan publik semakin berkualitas dan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1297 / SATPOL.PP tanggal 26 Juli 2026, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2026 Dalam Rangka Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 26 Juli 2026 di mulai pukul 06.00 WIB di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya' Heryanto. S,H.

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, membuka Kegiatan Pengembangan Kompetensi JPT Pratama 2026 yang diikuti 50 kepala perangkat daerah sebagai upaya memperkuat kepemimpinan strategis dan transformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Kalbar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi pejabat tinggi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 yang diikuti oleh 50 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Strategis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Menuju Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”, sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur dalam

menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan pengembangan kompetensi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Windy, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pelatihan rutin, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat karakter kepemimpinan para pejabat tinggi pratama agar mampu membawa perubahan positif di lingkungan birokrasi. “Pengembangan kompetensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter kepemimpinan, meningkatkan integritas, serta membangun sinergi yang lebih kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya, Minggu (26/7/2026). Ia menjelaskan, para kepala perangkat daerah memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan dinilai sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan manajerial, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integritas, disiplin, profesionalisme, serta membangun semangat korps Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan. Windy menegaskan bahwa seorang Pejabat Pimpinan Tinggi tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin perubahan yang membangun budaya kerja, menggerakkan organisasi, serta menjadi teladan bagi seluruh aparatur. “Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Kepemimpinan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar simbol kehormatan,” tegasnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mendapatkan berbagai materi strategis, diskusi kelompok, latihan kepemimpinan, hingga kegiatan team building yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antarpimpinan perangkat daerah. Melalui pendekatan tersebut, BPSDM Kalbar berharap mampu menghilangkan ego sektoral yang selama ini

kerap menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan saling mendukung. Windy menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan ditentukan oleh kemampuan seluruh perangkat daerah untuk bekerja sebagai satu tim yang solid. “Kemajuan Kalimantan Barat hanya dapat dicapai apabila seluruh perangkat daerah mampu bersinergi, saling menguatkan, dan bergerak bersama menuju tujuan pembangunan yang sama,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi strategis, adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam memberikan pelayanan publik, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas kepemimpinan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis transformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat sehingga pelayanan publik semakin berkualitas dan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1340 / SATPOL.PP tanggal 3 Agustus 2026, dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2026 Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pelepasan dan Pemberian Arahan kepada Peserta SSB (Sekolah Sepak Bola) Kapuas Khatulistiwa U-12 menuju Liga Top Skor (LTS) Nasional Tahun 2026 di Kantor Gubernur.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 3 Agustus 2026 di mulai pukul 16.00 WIB di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya’ Heryanto. S,H.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi melepas kontingen Sekolah Sepak Bola (SSB) Kapuas Khatulistiwa (K2) Kelompok Umur (KU)-12 yang akan mewakili Kalimantan Barat pada ajang Liga TopSkor Tingkat Nasional di Bogor, yang mulai berlangsung pada 5 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus memberikan motivasi kepada para pemain agar bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga nama baik Kalimantan Barat. “Bermainlah dengan jujur dan sportif. Prestasi itu penting, tetapi budi pekerti jauh lebih penting. Yang terpenting, percaya diri. Jangan pernah gentar menghadapi siapa pun. Kalian akan bertemu tim-tim hebat, Semuanya sama-sama hebat,” pesan Krisantus kepada para pemain. Menurutnya, keikutsertaan SSB Kapuas Khatulistiwa KU-12 di Liga TopSkor Nasional merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Barat karena tim tersebut menjadi wakil resmi provinsi dalam kompetisi sepak bola usia dini tingkat nasional. Ia mengingatkan bahwa para pemain membawa harapan jutaan masyarakat Kalimantan Barat sehingga diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah. “Kalian membawa nama Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Kalau kalian menang, jutaan masyarakat akan ikut bangga. Karena itu berlatihlah dengan sungguh-sungguh, jaga kesehatan, tingkatkan kemampuan bermain, dan patuhi arahan pelatih yang telah menyusun strategi terbaik.

Menurutnya, keberhasilan SSB Kapuas Khatulistiwa menjadi juara Liga TopSkor Regional Kalimantan Barat telah membuktikan bahwa talenta sepak bola dari Kalbar mampu bersaing dengan daerah

lain. “Kalian adalah perwakilan Kalimantan Barat di dunia sepak bola. Keberhasilan menjadi juara Liga TopSkor Regional Kalimantan Barat membuktikan bahwa kualitas sepak bola daerah kita tidak boleh dipandang sebelah mata,” katanya. Selain memberikan semangat kepada para atlet muda, Krisantus juga berpesan kepada pelatih, official, dan orang tua agar memberikan pendampingan maksimal selama mengikuti kompetisi. Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan mental para pemain agar dapat bertanding dengan nyaman, percaya diri, dan penuh kegembiraan. “Kepada para pelatih, official, dan orang tua, saya titipkan anak-anak kita ini. Jaga kondisi fisik dan mental mereka, pastikan mereka bertanding dalam keadaan bahagia dan prima. Selamat berjuang, semoga membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat,” tuturnya. Pelepasan kontingen SSB Kapuas Khatulistiwa KU-12 menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung pembinaan olahraga usia dini. Melalui ajang Liga TopSkor Nasional, diharapkan para pemain tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas serta membawa nama baik Kalimantan Barat di kancah sepak bola nasional.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1365 / SATPOL.PP tanggal 8 Agustus 2026, dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada kegiatan Budaya Satria Pembela Melayu di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 8 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya’ Heryanto. S,H.

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

GUBERNUR RIA NORSAN HADIRI MILAD KE - 8 SATRIA PEMBELA MELAYU DAN PELANTIKAN PENGURUS KABUPATEN / KOTA SE KALIMANTAN BARAT. PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M.,M.H, menghadiri acara Milad ke - 8 Satria Pembela Melayu Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Sabtu Malam (23/8/2025). Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan bahwa Peringatan Hari Lahir bukan sekedar acara seremonial melainkan sebuah momen penting untuk mengenang perjalanan organisasi Satria Pembela Melayu dalam menjaga, merawat, dan memperjuangkan nilai-nilai luhur budaya Melayu. "Delapan tahun bukanlah waktu yang singkat dan tentu banyak dinamika, suka maupun duka, yang telah dilalui, namun justru dari sanalah kita belajar tentang arti kebersamaan , keikhlasan serta komitmen dalam memperjuangkan marwah Melayu", tutur Gubernur Ria Norsan.

Dirinya berharap agar agenda ini dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat dan motivasi kita dalam upaya menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Melayu. "Untuk itu, langkah itu perlu dilakukan, agar nilai-nilai budaya positif yang telah diwariskan oleh para leluhur tidak luntur dan sirna oleh pengaruh budaya luar, yang dapat menyebabkan kita kehilangan jati diri". Ungkap Ria Norsan

Gubernur Kalbar Ria Norsan juga mengungkapkan bahwa sikap menjaga nilai - nilai budaya bukan berarti menutup diri pada pergaulan global yang dinamis, melainkan sebagai sikap dan rasa tanggung jawab selaku pemegang tongkat estafet terhadap amanah generasi terdahulu untuk diteruskan kepada generasi masa kini dan masa mendatang. "Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran

Satria Pembela Melayu yang telah berperan aktif dalam menjaga harmoni masyarakat, mempererat tali silaturahmi, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, Organisasi ini bukan hanya wadah kebersamaan, tetapi juga benteng moral dan sosial dalam memperkuat identitas Melayu sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia", jelas Gubernur Riau Norsan. Melalui Momentum milad ke - 8 Satria Pembela Melayu, dirinya juga mengajak untuk menjadikan semangat Satria Pembela Melayu sebagai energi dalam membangun masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan bersatu padu, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur warisan leluhur. "Semoga Satria Pembela Melayu semakin jaya, semakin solid, senantiasa memberi manfaat bagi umat, bagi Kalimantan Barat dan Indonesia" tutup Gubernur Riau Norsan.

Usai sambutan Gubernur Kalbar dilakukan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah untuk Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang. Acara tersebut turut dihadiri oleh Perwakilan Walikota Pontianak, Asisten Administrasi dan Umum, Drs. H. Alfian Salam, M.M, Kepala Badan Kesbangpol provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Manto, M.Si, Sultan Kadriah Pontianak yang juga sebagai Ketua DPD RI, Yang Mulia Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie, S.H, Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) Agus Setiadi, S.E, Panglima Besar Satria Pembela Melayu beserta Pengurus dan Jajarannya.

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1366 / SATPOL.PP tanggal 9 Agustus 2026, dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2026 Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Pelantikan Pengurus Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 9 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB di Pendopo Gubernur Provinsi Kalimantan barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya' Heryanto. S,H.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melantik Pengurus Pusat Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu (YPBM) se-Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Minggu, 9 Agustus 2026. Pelantikan tersebut dihadiri para tokoh masyarakat Bugis dan Melayu, Forkopimda, serta tamu undangan. Momentum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat persaudaraan dan sinergi antaretnis dalam bingkai persatuan di Bumi Khatulistiwa. Dalam sambutannya, Krisantus berharap YPBM dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung pembangunan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Menurut Krisantus, YPBM tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi harus mampu menjadi rumah bersama untuk merawat budaya, memperkuat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Selamat dan apresiasi atas terselenggaranya deklarasi pada hari ini. Kepada seluruh pengurus yang dilantik, saya ucapkan selamat menjalankan tugas dan selamat menjalankan amanah yang sudah dipercayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu,” ungkap Krisantus. Wagub Kalbar itu juga menekankan pentingnya pelestarian budaya di tengah perkembangan globalisasi dan digitalisasi yang berlangsung begitu cepat. Menurutnya, kelompok masyarakat yang tidak mampu melestarikan budaya dan menghormati nilai-nilai luhur yang diwariskan

para pendahulu berisiko kehilangan jati dirinya. “Budaya bukan sekadar pakaian, tarian, makanan, bahasa atau upacara adat. Budaya adalah nilai, karakter dan cara kita memperlakukan sesama,” jelasnya. Karena itu, lanjut Krisantus, nilai gotong royong, saling menghormati, menghargai orang tua, menjaga persaudaraan, serta membantu sesama harus terus ditanamkan dan diwariskan kepada generasi muda.

Wagub mengajak seluruh masyarakat untuk melahirkan generasi yang terbuka terhadap kemajuan, menguasai teknologi dan mampu bersaing, namun tetap memiliki jati diri serta kuat berakar pada nilai-nilai budaya. “Mari kita lahirkan generasi yang terbuka terhadap kemajuan, menguasai teknologi dan mampu bersaing, namun tetap memiliki jati diri dan kuat dalam akar budayanya. Modern dalam cara berpikir, maju dalam kemampuan, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai luhur budaya,” ajaknya.

Krisantus menegaskan, keberagaman suku dan budaya yang ada di Kalimantan Barat merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama. Perbedaan tersebut, apabila dikelola dengan baik, justru menjadi kekuatan sekaligus warna yang memperindah kehidupan masyarakat di Bumi Khatulistiwa. “Kalimantan Barat ini ada 24 suku yang sudah tercatat, yang sudah hidup turun-temurun. Saya pun tidak tahu kapan datangnya. Bahkan saudara-saudaraku suku Bugis juga tidak tahu secara persis kapan datang ke Kalimantan Barat,” tegasnya. Krisantus menambahkan, keberadaan masyarakat Bugis di Kalimantan Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan daerah ini. “Bugis yang ada di Kalimantan Barat adalah Bugis Kalimantan Barat, bukan Bugis di Pulau Sulawesi,” ungkapnya. Lebih lanjut, Krisantus menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, tanpa memandang suku, agama maupun latar belakang budaya, dapat hidup aman, nyaman dan saling menghormati. “Suku apa pun, agama apa pun, budaya apa pun. Jangankan disakiti, dicubit pun tidak boleh. Ini yang harus saya jaga,” tegasnya. Krisantus mengajak seluruh keluarga besar YPBM untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan Kalimantan Barat.

“Jadikan semangat persaudaraan Bugis dan Melayu sebagai energi positif untuk membangun daerah bagi seluruh masyarakat, serta mewujudkan Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1374 / SATPOL.PP tanggal 10 Agustus 2026, dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 Dalam Rangka Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 di Gedung Garuda dan Aula Enggang Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 11 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB di Gedung Garuda dan Aula Enggang Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya’ Heryanto. S,H.

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merayakan Hari Anak Nasional Kalimantan Barat ke-42 pada Selasa, 11 Agustus 2026, di Aula Garuda dan Enggang Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Peringatan ini dilakukan untuk memperkuat komitmen pemerintah bersama masyarakat dalam memenuhi hak, memberikan perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan anak dan sejumlah pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, Marlyna mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional sebenarnya telah dimulai sejak 26 Juli. "Rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional ini sebenarnya jatuh pada 26 Juli di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah kita peringati dengan berbagai rangkaian kegiatan," kata Marlyna.

Menurutnya, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas Forum Anak Daerah Kalimantan Barat. Dengan adanya kegiatan dalam Forum tersebut dapat menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak. "Kita melakukan peningkatan kapasitas Forum Anak Daerah Kalimantan Barat sebagai pelopor dan pelapor dan dilanjutkan dengan penyusunan suara anak Kalimantan Barat," paparnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menggelar Podcast Bersama Lindungi Anak Kalimantan Barat (BERLIAN) yang difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. "Kami melakukan Podcast BERLIAN, yang difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat," tambahnya. Marlyna menambahkan, pemerintah juga melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bagian dari upaya menuju Provinsi Layak Anak. "Kami juga melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Menuju Provinsi Layak Anak, mudah-mudahan tahun ini Kalimantan Barat bisa mendapatkan Provinsi Layak Anak," jelasnya.

Rangkaian kegiatan juga diarahkan pada edukasi dan pencegahan berbagai persoalan yang dapat mengancam tumbuh kembang anak. Sementara itu, Bunda Forum Anak Kalimantan Barat, Erlina, menegaskan bahwa menyayangi anak tidak cukup hanya dengan memberikan kasih sayang. Menurutnya, pemenuhan hak anak harus mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan hingga kesempatan untuk berkembang. "Menyayangi anak bukan sekedar memberikan kasih sayang, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh perhatian, pendidikan, kesehatan, perlindungan serta kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi

yang dimilikinya," jelas Erlina. Ia mengajak seluruh pihak menghadirkan lingkungan yang aman dan ramah anak, mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1459 / SATPOL.PP tanggal 21 Agustus 2026, dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2026 Dalam Rangka Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rakorda MUI Wilayah V se-Kalimantan di Pendopo Gubernur Provinsi Kalbar

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 22 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB di Gedung Garuda dan Aula Enggang Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya' Heryanto. S,H.

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah V se-Kalimantan resmi menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2026. Acara pembukaan dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, dan dihadiri oleh 187 delegasi dari lima provinsi di Pulau Kalimantan. Sabtu, 22/8. Mengusung tema “Peran Strategis MUI dalam Merespon Masalah Ekonomi, Ekologi, dan Sosial Keagamaan di Tengah Perubahan Zaman”, Rakorda kali ini secara tajam menyoroti ironi kekayaan alam Kalimantan yang dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., dalam orasi kebangsaannya memaparkan data besarnya potensi batu bara, kelapa sawit, emas, hingga bauksit di Kalimantan yang mendatangkan triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun, ia mengkritisi ketimpangan yang terjadi karena hasil kekayaan alam tersebut lebih banyak dinikmati oleh segelintir oligarki. “Kalimantan ini sangat-sangat kaya, tetapi mengapa MUI-nya miskin? Ini pertanda pengusaha tambang dan perkebunan kurang memiliki kepedulian. Kami mendorong perusahaan-perusahaan ini menerapkan konsep Triple P (Profit, People, Planet) agar keuntungan usaha dibagikan juga kepada masyarakat (people) tanpa merusak lingkungan (planet), salah satunya melalui kucuran CSR untuk mendukung program pembinaan umat oleh MUI,” tegas Buya Anwar Abbas. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Dr. H. Harison, M.Kes., yang hadir mewakili Gubernur Kalbar, menyambut baik usulan penyaluran dana CSR dari korporasi. Dalam sambutannya, Harison juga mengangkat isu ekologi yang saat ini mendera Kalbar, yakni bencana kabut asap akibat terdeteksinya lebih dari 3.100 titik panas (hotspot).

Harison turut menyuarakan ketidakadilan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, meski Kalbar menyumbang devisa besar melalui ekspor produk hilirisasi bauksit dan Crude Palm Oil (CPO), dana yang dikembalikan ke daerah dinilai sangat kecil dan tidak sebanding dengan kerusakan ekologi yang ditinggalkan. “Kami memproduksi sawit dan alumina dengan mengorbankan lingkungan, tapi yang balik ke kami sangat minim, sisanya kami hanya menghirup asap. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum MUI Kalbar, Dr. K.H. Basri Har menekankan kembali fungsi utama MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) yang menjaga akidah, serta shodiqul hukumah (mitra strategis pemerintah) dalam membangun sinergi bangsa. Dalam kesempatan Rakorda ini, MUI Kalbar juga mencanangkan proyek penulisan sejarah penyebaran agama bertajuk buku “Islam Borneo” yang ditargetkan rampung pada 2027. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Sekretaris MUI Kalbar, H.

Muhammad Sani, S.H., M.Ap., melaporkan bahwa sidang-sidang komisi Rakorda dipusatkan di Hotel Grand Mahkota Pontianak untuk mengevaluasi program kerja dan merumuskan langkah strategis MUI ke depan. Rakorda MUI Wilayah V se-Kalimantan 2026 ini resmi dibuka dengan prosesi pemukulan gong oleh Sekda Provinsi Kalbar. Rangkaian pembukaan juga ditandai dengan penyerahan bantuan fasilitas sertifikasi halal kepada sejumlah pelaku usaha Rumah Potong Hewan (RPH) unggas oleh Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1460 / SATPOL.PP tanggal 21 Agustus 2026, dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2026 Dalam Rangka Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Karnaval Budaya di Halaman Kantor Gubernur – Museum Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 22 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB di Halaman Kantor Gubernur – Museum Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh oleh Plt Kepala Seksi Kewaspadaan Dini – Ya' Heryanto. S,H.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) kembali menggelar Borneo Legalia Forum (BLF) 2026. Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, kegiatan ini memperluas cakupan peserta dari sebelumnya hanya Kalimantan Barat menjadi se-Kalimantan. BLF 2026

mengangkat berbagai persoalan lingkungan dan kondisi ekologis yang terjadi di wilayah Kalimantan. Tahun ini, salah satu perguruan tinggi dari luar Kalimantan Barat yang turut berpartisipasi adalah Universitas Palangkaraya.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Untan, Hamdani, mengatakan isu lingkungan menjadi fokus BLF 2026 karena kondisi lingkungan di Kalimantan saat ini membutuhkan perhatian dan solusi bersama. Gandeng Komisi XIII DPR RI, Kemenkum Kalbar Perkuat Komunikasi Layanan Hukum “Di tahun ini memang ada perluasan, kalau dua kegiatan sebelumnya hanya untuk di Kalimantan Barat, tapi tahun ini se-Kalimantan. Diharapkan isu-isu yang mereka bahas ini adalah isu-isu lingkungan yang terjadi di wilayah Kalimantan,” ujar Hamdani, usai membuka kegiatan yang dilangsungkan di Aula Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Rabu, 19 Agustus 2026. Menurut Hamdani, forum ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa menghasilkan gagasan untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan. Gagasan tersebut nantinya dapat dirumuskan menjadi rekomendasi bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hamdani menambahkan, BLF merupakan gagasan mahasiswa yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan pihak Fakultas Hukum Untan. Ke depan, forum serupa diharapkan dapat terus digelar untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia BLF 2026, Hera, mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan selama kurang lebih delapan bulan. Rangkaian BLF 2026 sendiri berlangsung selama lima hari. “Untuk persiapan panitia itu sendiri, kami ada kurang lebih delapan bulan untuk mempersiapkan lima hari kegiatan,” kata Hera. Melalui BLF 2026, mahasiswa diharapkan tidak hanya membahas persoalan lingkungan dari sisi akademis, tetapi juga mampu melahirkan gagasan yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan terkait lingkungan di Kalimantan.

C. Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Dalam Rangka Deteksi Dini Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kewaspadaan Dini, berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1187 / SATPOL.PP tanggal 3 Juli 2026. Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Konferensi Provinsi II Gerakan Pemuda Dayak Kalbar (Tentatif) di Hotel Harris Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 3 Juli 2026 di mulai pukul 19.00 WIB di Hotel Harris Pontianak.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (Gerdayak) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov) II Tahun 2026 di Hotel Harris Pontianak pada 3–5 Juli 2026. Forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi ini mengusung tema "Eksistensi Masyarakat Dayak di Tengah Arus Globalisasi." Ketua Panitia Konferprov II Gerdayak Kalbar Tahun 2026, Krisantus Heru Siswanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam suasana sehat, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Konferprov II merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sebagai forum evaluasi kepengurusan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyusunan program kerja, sekaligus pemilihan kepemimpinan.

Gerdayak Kalbar untuk periode berikutnya. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen, di antaranya Dewan

Perwakilan Nasional (DPN) Gerdayak Indonesia, unsur Pemerintah Provinsi Kalbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan organisasi kemasyarakatan, paguyuban multi-etnis, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kolaborasi lintas organisasi, lintas etnis, dan lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. "Konferprov II bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi, melahirkan gagasan-gagasan strategis, serta mempertegas peran pemuda Dayak dalam menghadapi tantangan globalisasi," ucap Heru, Jumat, 4 Juli 2026. Ia juga berharap forum ini menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang mampu mendukung pembangunan daerah, melestarikan budaya, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1218 / SATPOL.PP tanggal 9 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Gerakan Aksi Indonesia Asri di Masjid Mujahidin Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 10 Juli 2026 di mulai pukul 06.00 WIB di Hotel Harris Pontianak.

3. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi budaya masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

"Ke depan, dengan dukungan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat, kegiatan kurve atau kerja bakti dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga Kota Pontianak maupun seluruh wilayah Kalimantan Barat benar-benar menjadi daerah yang aman, sehat, resik, dan indah," kata Harisson saat menghadiri Gerakan Indonesia ASRI di Halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Minggu.

Menurut dia, pembangunan dan modernisasi yang terus berkembang turut menghadirkan tantangan lingkungan berupa persoalan sampah, polusi, hingga menurunnya kualitas kebersihan dan keindahan kota yang kini menjadi isu strategis nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya strategis nasional untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata, sehat, dan aman di seluruh wilayah Indonesia.

Harisson mengatakan empat pilar dalam Gerakan Indonesia ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling menguatkan dalam membangun kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Ia menegaskan, lingkungan yang bersih dan indah akan menciptakan kondisi yang sehat dan aman sekaligus menjadi fondasi perubahan perilaku masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Suherman mengatakan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di

daerah mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia saat Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah pada 2 Februari 2026.

Gerakan tersebut juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 6.11/889/SD tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI serta surat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 26 Juni 2026.

Kasatpol PP Prov Kalbar menjelaskan rangkaian kegiatan Gerakan Indonesia ASRI di Kalimantan Barat meliputi kerja bakti bersama yang melibatkan aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan masyarakat, penanaman 50 pohon, pasar murah sebanyak 1.000 paket sembako, pembagian perlengkapan sekolah kepada 75 anak, serta donor darah dengan target 100 pendonor. Selain mengikuti pencanangan Gerakan Indonesia ASRI secara nasional yang dipusatkan di Kota Malang secara virtual, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan aksi penanaman pohon di kawasan Masjid Raya Mujahidin Pontianak dan kegiatan bersih-bersih lingkungan.

Pasar murah yang digelar dalam kegiatan tersebut menyediakan 1.000 paket sembako yang terdiri atas beras, minyak goreng, dan telur untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

3. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1218 / SATPOL.PP tanggal 9 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Gerakan Aksi Indonesia Asri di Masjid Mujahidin Kota Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 10 Juli 2026 di mulai pukul 06.00 WIB di Hotel Harris Pontianak.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat tata kelola industri kelapa sawit melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi kontribusi perusahaan terhadap daerah, serta dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi arahan pemerintah pusat melalui Danantara. Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026). Dalam arahannya, Krisantus menekankan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memiliki komitmen nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, seluruh perusahaan, termasuk yang berkantor pusat di luar Kalimantan Barat, wajib menghormati kearifan lokal serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” tegas Krisantus. Ia menilai keberadaan perusahaan harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan sektor perkebunan dapat berjalan selaras dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain aspek kepatuhan, Wakil Gubernur juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutya, masih ditemukannya kawasan permukiman yang kurang

layak di sekitar wilayah operasional perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum berjalan secara optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan melaksanakan program CSR secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP). Ia menilai potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut masih dapat ditingkatkan agar sejalan dengan aktivitas perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air.

Untuk memastikan kepatuhan perusahaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk tim yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi terhadap penggunaan air permukaan oleh perusahaan. “Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” katanya. Lebih lanjut, Krisantus menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan seluruh perusahaan dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan pembangunan daerah. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. “Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan agar

seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” tandasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta dalam mendukung tata kelola industri kelapa sawit yang lebih tertib, transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi sektor perkebunan terhadap peningkatan perekonomian daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

4. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1248 / SATPOL.PP tanggal 15 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Rapat Kerja BPABI Tahun 2026 dan Sosialisasi IP4KB (Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat) di Gedung Rapat Universitas Panca Bhakti (UPB).

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 15 Juli 2026 di mulai pukul 09.00 WIB di Hotel Harris Pontianak.

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Badan Pengelola Aset Bisnis dan Investasi (BPABI) Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja Tahun 2026 dan Sosialisasi Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB) di Gedung Graha Bhakti UPB Pontianak. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dan dihadiri Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar Cornelius Kimha, Rektor

UPB, Sekum DAD Kalbar Tadeyus Yus, Ketua BPABI, KSOP Kalbar, Dinas Perhubungan, pengurus BPABI DAD Kalbar serta para mitra.

Dalam sambutannya, Wagub Krisantus Kurniawan menyampaikan dukungan Pemprov Kalbar terhadap keberadaan BPABI DAD Kalbar dalam memenuhi kebutuhan ternak masyarakat. “Kite ingin babi, sapi dan kambing merupakan hasil Kalimantan Barat bukan dari luar, kita upayakan untuk swasembada ternak,” tegas Wagub. Ia menyebut BPABI menjadi asosiasi penting dalam memenuhi kebutuhan babi di Kalbar.

Babi Bagian Filosofi Adat Dayak

Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar, Cornelius Kimha menyampaikan, dalam tatanan adat Dayak, babi selain ayam adalah hewan yang tidak bisa dihilangkan karena memiliki filosofi sangat mendalam bagi masyarakat adat Dayak. “Pernah di Kalbar hampir setiap kecamatan babi itu mati karena penyakit. 40% penduduk di Kalbar masih mengonsumsi babi, maka DAD membentuk BPABI untuk ketersediaan babi ini,” ujarnya. Cornelius juga menyarankan perlunya MoU antara Provinsi pengirim dan penerima, seperti Bali dan Lampung. Ia berharap Pemprov Kalbar punya rencana swasembada hingga bisa ekspor ke Singapura dan negara lain, tidak hanya babi tapi juga sapi dan hewan lainnya. Ia menegaskan DAD menjaga barang masuk ke Kalbar dalam keadaan baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Kerja sama dengan mitra dan pemerintah selama ini sudah baik dengan tujuan saling menguntungkan dan menjaga wibawa pemerintah. BPABI Jadi Garda Depan Pemenuhan Ternak

Ketua Umum BPABI, Romana Burhan Bulin menjelaskan ini merupakan Raker pertama BPABI bersama mitra. “Marwah DAD Kalbar yang diberikan merupakan amanah. Bimbingan dari DAD sangat diperlukan terutama terkait pemenuhan kebutuhan konsumen babi,” ucapnya. Dari 2024 sampai 2026 BPABI sudah menggandeng 8 perusahaan mitra khususnya dalam pemenuhan kebutuhan babi dari luar daerah Kalbar. BPABI juga berupaya menstabilkan harga babi di

tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. “Babi bukan sekadar ekonomi juga merupakan ritual adat Dayak. Termasuk menjamin ketersediaan hewan babi hitam atau babi kampung,” jelasnya. Menurut Romana, hal ini tidak bisa maksimal tanpa dukungan Dinas Bunak, Karantina, dan Dinas Perhubungan.

Dalam kesempatan yang sama BPABI juga membentuk IP4KB – Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1262 / SATPOL.PP tanggal 17 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Nonton Bareng SemiFinal Piala Dunia di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 18-19 Juli 2026 di mulai pukul 21.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Ribuan masyarakat Kalimantan Barat memadati Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk mengikuti nonton bareng (nobar) pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia FIFA 2026, Minggu dini hari (19/7/2026). Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme, sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, warga dari berbagai kalangan telah memadati lokasi kegiatan. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, dan komunitas untuk menikmati suasana pesta

sepak bola dunia dalam kebersamaan yang aman, tertib, dan penuh semangat sportivitas.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar Erlina turut hadir dan menyaksikan langsung jalannya pertandingan bersama masyarakat. Kehadiran orang nomor satu di Kalbar itu semakin menambah semarak suasana nobar yang berlangsung hingga dini hari. Dalam sambutannya, Ria Norsan mengatakan kegiatan nonton bareng tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga momentum untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat. “Nobar ini bukan sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan. Kita memang tidak berada di Amerika Serikat, tetapi suasana kebersamaan yang tercipta di halaman Kantor Gubernur maupun di berbagai titik nobar di seluruh Kalimantan Barat tidak kalah meriah. Inilah pesta rakyat yang harus kita nikmati bersama dengan menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya.

Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan area bazar UMKM dan kuliner di sekitar lokasi sehingga pelaku usaha lokal dapat memanfaatkan tingginya jumlah pengunjung untuk meningkatkan penjualan. Menurut Norsan, penyelenggaraan nobar gratis yang digelar di berbagai daerah merupakan kegiatan yang patut didukung karena mampu menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi secara bersamaan. “Kami sangat mendukung inisiatif penyelenggaraan nobar gratis di kabupaten dan kota. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan seperti ini juga menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM,” katanya. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung. Ia menegaskan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim favorit harus disikapi secara dewasa dan tidak

mengurangi semangat persatuan serta kebersamaan sebagai warga Kalimantan Barat.

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Karena itu, ia mengajak masyarakat menyambut partai final Piala Dunia FIFA 2026 dengan penuh kegembiraan dan menjadikannya sebagai sarana mempererat hubungan sosial di lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah mengikuti kegiatan dengan tertib dan kondusif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga membagikan berbagai doorprize kepada peserta yang telah melakukan registrasi sebelumnya. Ria Norsan menegaskan bahwa hadiah yang diberikan bukanlah tujuan utama kegiatan, melainkan simbol penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, dan penuh sportivitas. “Nobar ini adalah pesta kita bersama. Doorprize hanyalah bentuk penghargaan kecil dari pemerintah. Yang paling penting adalah kebersamaan, kekompakan, dan kegembiraan yang kita rasakan bersama sebagai satu keluarga besar masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Kegiatan nobar berlangsung lancar hingga pertandingan berakhir. Ribuan warga tampak menikmati jalannya laga dengan tertib, menjadikan malam itu sebagai salah satu momen kebersamaan yang berkesan dalam rangkaian kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 di Kalimantan Barat.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1263 / SATPOL.PP tanggal 20 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Nonton Bareng SemiFinal Piala Dunia di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 20 Juli 2026 di mulai pukul 21.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Ribuan warga memadati halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina, Senin (20/7/2026) dini hari. Suasana nonton bareng berlangsung meriah hingga peluit panjang dibunyikan, yang memastikan Spanyol keluar sebagai juara dunia. Tim berjuluk La Furia Roja memastikan gelar juara setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Dunia kedua bagi Spanyol sejak terakhir menjuarainya pada 2010. Gubernur Ria Norsan yang hadir bersama Ketua TP PKK Kalbar Erlina Ria Norsan turut menyaksikan pertandingan bersama masyarakat. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Timnas Spanyol sekaligus mengapresiasi penampilan kedua tim yang dinilai menunjukkan kualitas sepak bola terbaik dunia. "Selamat kepada Tim Spanyol atas keberhasilannya menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026. Permainan yang ditampilkan menunjukkan bahwa kerja sama tim, disiplin, dan konsistensi dalam menjalankan strategi menjadi kunci meraih hasil terbaik," kata Norsan. Menurutnya, pertandingan final berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama memperlihatkan semangat juang dan sportivitas tinggi hingga laga harus ditentukan melalui babak perpanjangan waktu.

Ia berharap semangat kerja keras dan sportivitas yang ditunjukkan para pemain dapat menjadi inspirasi bagi atlet dan generasi muda di Kalbar untuk terus meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga. "Prestasi Spanyol membuktikan bahwa keberhasilan tidak diraih secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang, dedikasi, dan

kerja sama yang kuat. Semoga semangat itu menjadi motivasi bagi kita untuk terus membangun prestasi olahraga di Kalimantan Barat," ujarnya.

Suasana nonton bareng berlangsung semarak. Masyarakat datang mengenakan atribut tim favorit masing-masing dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Meski terbagi dalam dua kubu pendukung, seluruh peserta tetap menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi sportivitas.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga menyediakan berbagai doorprize yang menambah antusiasme warga. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga menjadi ruang berkumpul masyarakat dalam suasana kebersamaan

7. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1294 / SATPOL.PP tanggal 24 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Haflatul Imtihan ke-41 Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum di Desa Sungai Enau - Kuala Mandor B, Kab. Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 24 Juli 2026 di mulai pukul 18.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Haflatul Imtihan ke-41 Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Nurul Ulum sukses diselenggarakan pada Jumat, 24 Juli 2026 di Halaman LPI Nurul Ulum, Jl. Munggu Mas, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus, menghadiri Haflatul Imtihan ke-41 Lembaga Pendidikan Islam (LPI)

Nurul Ulum di Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (24/7/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan Wakil Gubernur untuk mengajak seluruh masyarakat terus merawat persatuan, memperkuat pendidikan pesantren, serta menjaga kedamaian sebagai fondasi pembangunan Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri Ketua DWP Ikama Kalbar beserta jajaran, Pimpinan LPI Nurul Ulum Kyai Ahmad Yani, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para kepala desa, serta ratusan santri dan masyarakat. Dalam sambutannya, Krisantus mengapresiasi kiprah LPI Nurul Ulum yang selama lebih dari empat dekade konsisten mencetak generasi berakhlak mulia. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Madura, yang turut berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Barat.

Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang harus terus dijaga melalui semangat toleransi dan persaudaraan. “Kalimantan Barat ini guyub, harmonis, dan toleran. Keberagaman adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan menjadi kekuatan untuk membangun daerah bersama,” ujar Krisantus. Untuk menggambarkan pentingnya keberagaman, ia mengibaratkannya seperti sebuah tenda yang berdiri kokoh karena tersusun dari berbagai unsur yang berbeda, namun saling melengkapi. Selain menekankan pentingnya kerukunan, Wakil Gubernur juga menyoroti peran strategis pondok pesantren dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Menurutnya, pesantren memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka kesempatan luas bagi para santri untuk berkiprah di berbagai bidang. “Santri memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin daerah, anggota legislatif, menteri, bahkan jenderal. Karena itu, perhatian terhadap pendidikan pesantren harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Krisantus juga mengingatkan para orang tua agar menjadikan pendidikan sebagai investasi terbaik bagi masa depan anak-anak. “Kita tidak pernah tahu rencana Allah SWT terhadap masa depan anak-anak kita. Karena itu, bekalilah mereka dengan pendidikan terbaik, baik di

sekolah umum maupun di pondok pesantren,” Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut menyoroti tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Ia meminta perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk membantu perbaikan infrastruktur jalan. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan bersikap tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban sosial maupun ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah juga akan menginventarisasi ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah untuk diusulkan penanganannya melalui APBD.

Menutup sambutannya, Krisantus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun budaya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan menolak segala bentuk tindakan yang berpotensi memecah persatuan. “Kunci kemajuan daerah adalah kedamaian. Mari kita bersatu menjaga Kalimantan Barat agar tetap menjadi rumah yang aman, nyaman, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. Dalam sesi wawancara, Krisantus mengaku bangga dapat bertemu langsung dengan para santri yang merupakan generasi penerus bangsa. Ia berharap para kiai, pembina, dan pengasuh pondok pesantren terus menanamkan nilai-nilai keimanan, kebangsaan, dan karakter kepada para santri sehingga mampu menjadi generasi yang religius, berintegritas, serta siap membangun Kalimantan Barat di masa depan.

8. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1313 / SATPOL.PP tanggal 28 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Gubernur di Kabupaten Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 28 Juli 2026 di mulai pukul 09.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar senam bersama sebagai rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-54 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa, 28 Juli 2026, menjadi pembuka sebelum pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XXIII. Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengatakan puncak peringatan HKG PKK ke-54 di Kabupaten Kubu Raya diramaikan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat, termasuk pameran Rumah Dilan yang menampilkan berbagai inovasi pendidikan dan keterampilan. "Rumah Dilan ini merupakan Rumah Pendidikan dan Keterampilan yang pertama kali diterapkan dalam rangkaian kegiatan HKG PKK di Indonesia. Seluruh kabupaten dan kota menampilkan inovasi terbaiknya, sehingga menjadi sarana berbagi pengalaman dan inspirasi dalam pemberdayaan masyarakat," ujar Sujiwo.

Sujiwo mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi berbagai stan pameran yang telah disiapkan. Menurutnya, kegiatan tersebut terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung berbagai inovasi dan produk unggulan yang ditampilkan oleh peserta dari 14 kabupaten dan kota. "Kami mengundang masyarakat yang berada tidak jauh dari lokasi kegiatan yakni warga Kubu Raya maupun Kota Pontianak untuk datang ke Kantor Bupati Kubu Raya. Silakan melihat stan pameran, menyaksikan berbagai lomba, dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami siapkan," katanya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan HKG PKK merupakan bagian dari lima agenda besar yang dipusatkan di Kabupaten Kubu Raya, yakni pengukuhan FORIKAN, Rapat Koordinasi Pokja Bunda PAUD se-Kalimantan Barat, Hari Kesatuan Gerak PKK, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, serta Gerakan Gemar Makan Ikan. Sujiwo berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina mengatakan Kabupaten Kubu Raya dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan HKG PKK ke-54 yang diikuti seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Menurutnya, momentum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi TP PKK bersama pemerintah daerah dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. "Hari ini kita melaksanakan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kubu Raya. Semoga momentum ini semakin memacu semangat seluruh TP PKK kabupaten dan kota untuk terus bermitra dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemajuan daerah melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK," ujarnya.

Erlina mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan. Ia menilai seluruh rangkaian acara dipersiapkan dengan baik sehingga mampu memberikan semangat bagi peserta yang berasal dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Menurutnya, pelaksanaan HKG PKK tahun ini juga menghadirkan inovasi berupa Rumah Dilan atau Rumah Pendidikan dan Keterampilan yang untuk pertama kalinya diterapkan dalam rangkaian HKG PKK tingkat provinsi. "Rumah Dilan menjadi inovasi yang sangat baik. Seluruh kabupaten dan kota menampilkan hasil terbaiknya. Ini menjadi contoh bagaimana rumah pendidikan dan keterampilan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

9. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1326 / SATPOL.PP tanggal 29 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 29 Juli 2026 di mulai pukul 09.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., secara resmi membuka Sidang ke-39 Kelompok Kerja Bersama/Joint Working Group (KK/JKK) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak.

Sidang SOSEK MALINDO merupakan forum kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan. Kerja sama ini mencakup bidang sosial, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur perbatasan hingga persoalan kemasyarakatan seperti perkawinan campuran dan pelayanan lintas batas.

Pembukaan sidang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., selaku Ketua KK SOSEK MALINDO Provinsi Kalimantan Barat, Pengerusi JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak yang diwakili Ketua Klaster II, Datu Ir. Ts. Awang Mohammad Fadillah Bin Awang Redzuan, unsur Forkopimda Provinsi

Kalimantan Barat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Konsul Malaysia di Pontianak, serta seluruh delegasi dari kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Kalbar menyampaikan bahwa forum SOSEK MALINDO tidak hanya membahas satu sektor tertentu, melainkan seluruh aspek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Yang dibahas dalam SOSEK MALINDO ini adalah berbagai bentuk kerja sama sosial, ekonomi, budaya, hingga persoalan masyarakat di kawasan perbatasan. Intinya bagaimana hubungan antara Kalbar dan Sarawak semakin erat dan memberi manfaat bagi masyarakat kedua wilayah,” lugasnya.

Ia mengatakan, pengembangan kawasan perbatasan akan semakin terbuka dengan hadirnya sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sedang dan akan dioperasikan. “Kita berharap dengan diresmikannya PLBN Temajuk nanti, kawasan itu bisa berkembang lebih cepat. Kita bisa membangun wilayah perbatasan bersama-sama. Jagoi Babang dari sisi Indonesia juga sudah selesai, tinggal penyelesaian dari pihak Malaysia,” katanya. Terkait peluang perdagangan lintas batas, implementasinya tetap harus mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. “Kalau menyangkut ekspor dan impor tentu akan kita kaji bersama. Pemerintah daerah harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat sebelum kerja sama itu dijalankan,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat perbatasan, termasuk perkawinan campuran antara warga Indonesia dan Malaysia.

“Masalah perkawinan campuran memang ada dan perlu terus dicarikan solusi bersama, karena ini menyangkut administrasi kewarganegaraan, tentu melibatkan pemerintah pusat, kementerian terkait dan juga imigrasi,” tutupnya. Sementara itu, Sekda Kalbar menyampaikan bahwa Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja sama yang telah terjalin selama puluhan tahun antara Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak. Ia menjelaskan, Delegasi Negeri Sarawak pada sidang

kali ini berjumlah 106 orang, sedangkan Delegasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 151 orang yang terdiri atas tim teknis, tenaga ahli perangkat daerah provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, lembaga terkait, tim peninjau dari berbagai kementerian Republik Indonesia, hingga perwakilan KADIN Indonesia. “Kehadiran seluruh delegasi menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari kedua belah pihak untuk terus mempererat persahabatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai isu strategis yang menjadi perhatian kedua wilayah,” ucapnya.

Harisson berharap seluruh pembahasan berjalan terbuka dan konstruktif sehingga menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan. Selain agenda persidangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada delegasi Negeri Sarawak. “Kami mengajak seluruh delegasi menikmati potensi Kota Pontianak melalui susur Sungai Kapuas, mengunjungi Tugu Khatulistiwa dan Rumah Caping Pontianak yang menampilkan produk ekonomi kreatif serta kerajinan khas Kalbar. Kami juga menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya sebagai bentuk persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia,” tutupnya. Di tempat yang sama, Ketua Klaster II JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak, mengungkapkan bahwa Sarawak tengah mempersiapkan pembukaan Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak yang ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2027.

Awang juga memastikan bahwa salah satu isu penting mengenai penanganan warga yang sakit maupun meninggal dunia di kawasan perbatasan telah memperoleh penyelesaian bersama. “Persoalan pengantaran pasien dan warga yang meninggal dunia telah kita selesaikan bersama. Kami berharap mekanisme ini dapat terus berjalan dengan baik. Apabila nanti muncul persoalan baru, kita akan kembali duduk bersama dengan Pemerintah Kalimantan Barat agar masalah tersebut tidak terulang lagi,” katanya. Melalui Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak berharap hubungan bilateral yang selama ini telah

terjalin baik dapat semakin diperkuat melalui berbagai kesepakatan konkret, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pelayanan masyarakat lintas batas, meningkatkan sektor perdagangan dan pariwisata, serta mempererat hubungan persaudaraan masyarakat Indonesia dan Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan.

10. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1335 / SATPOL.PP tanggal 31 Juli 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelantikan Pengurus PERBAKIN Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 31 Juli 2026 di mulai pukul 20.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Ketua Umum Pengurus Provinsi (Ketum Pengprov) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, resmi melantik jajaran Pengurus Kota (Pengkot) Perbakin Pontianak masa bakti 2025-2029. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Budi Sulistiono sebagai Ketum Pengkot Perbakin Pontianak. Di mana, kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan pembinaan atlet agar mampu berprestasi di tingkat daerah, nasional hingga internasional. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Ketum KONI Kota Pontianak, Herry Fadillah, dan

jajaran Pengprov Perbakin Kalbar, pengurus cabang olahraga, atlet, pelatih, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketum Pengkot Perbakin Pontianak Nomor 045/SKEP/PERBAKIN PTK/VII/2026 tentang Pengurus Kota Perbakin Pontianak Masa Bakti 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan patokan organisasi, penandatanganan berita acara pelantikan, serta pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Ketum Pengprov Perbakin Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan menjadi awal dari tanggung jawab besar dalam membangun organisasi yang semakin profesional dan berprestasi. Ia meminta kepengurusan yang baru segera melakukan konsolidasi internal, menyusun program kerja yang terukur, memperkuat pembinaan atlet usia dini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga soliditas organisasi. "Kepengurusan yang baru harus memiliki program kerja yang jelas, terukur, profesional, dan menjadikan pembinaan atlet sebagai prioritas utama organisasi," tegas Krisantus. Menurutnya, Perbakin Kota Pontianak memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan olahraga menembak di Kalimantan Barat apabila didukung dengan manajemen organisasi yang baik dan pembinaan atlet yang berkesinambungan.

Usai dilantik, Budi Sulistiono menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh jajaran pengurus dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan integritas. "Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang akan kami jalankan bersama seluruh jajaran pengurus dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat kebersamaan demi kemajuan Perbakin Kota Pontianak," ujarnya. Menurut Budi, fokus utama kepengurusan lima tahun ke depan adalah memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang. Program yang akan dijalankan meliputi penjangkauan bibit atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, penyelenggaraan kompetisi

secara berkelanjutan, hingga peningkatan sarana dan prasarana latihan. Ia menilai olahraga menembak tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sportivitas. Oleh karena itu, seluruh program organisasi akan dijalankan dengan mengedepankan aspek keselamatan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Budi juga mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, KONI, Pengprov Perbakin Kalbar, klub-klub menembak, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam memajukan olahraga menembak di Kota Pontianak. "Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar Perbakin Kota Pontianak mampu melahirkan atlet-atlet yang dapat mengharumkan nama Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di berbagai kejuaraan, baik tingkat regional, nasional maupun internasional," katanya. Terpilih Secara Aklamasi

Sebelum resmi dilantik, Budi Sulistiono terlebih dahulu dipercaya memimpin Perbakin Kota Pontianak melalui Musyawarah Kota (Muskot) Perbakin Kota Pontianak yang digelar di Hotel Borneo Pontianak, akhir tahun 2025. Dalam forum tersebut, Budi terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Pengkot Perbakin Kota Pontianak periode 2025-2029 setelah memperoleh dukungan penuh dari peserta Muskot. Muskot yang dihadiri pengurus, klub anggota, pembina, serta pemerhati olahraga menembak itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ketua Pengkot Perbakin Pontianak periode sebelumnya, Herry Fadillah, berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan berbagai program pembinaan yang telah dirintis serta membawa organisasi menjadi lebih maju. Sementara itu, Ketua Panitia Muskot, AKBP (Purn) Hasbullah A.R., menyebut Muskot berlangsung demokratis, transparan, dan penuh semangat kebersamaan sehingga menghasilkan kepengurusan yang mendapat dukungan seluruh peserta. Dengan telah dilantikannya kepengurusan baru, Perbakin Kota Pontianak diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda organisasi dan mampu mencetak atlet-atlet menembak berprestasi yang dapat

mengharumkan nama Kota Pontianak, Kalbar, hingga Indonesia di berbagai ajang kompetisi. Melalui kolaborasi yang kuat antara organisasi, Pemkot, KONI, klub-klub menembak, pelatih, dan para atlet, Perbakin Kota Pontianak diharapkan mampu menjadi salah satu organisasi olahraga yang berkontribusi dalam pembinaan olahraga prestasi sekaligus melahirkan generasi atlet menembak yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

11. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1344 / SATPOL.PP tanggal 4 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Peresmian Lapangan Tembak Indoor KODAERAL XII di Lapangan Tembak KODAERAL XII, Wajok - Kab. Mempawah.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 4 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Komandan Kodaeral XII Laksamana Muda TNI Sawa meresmikan Lapangan Tembak Indoor Jala Khatulistiwa di Markas Komando Kodaeral XII, Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Selasa, 4 Agustus 2026. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi sarana peningkatan profesionalisme prajurit sekaligus mendukung pembinaan atlet menembak di Kalimantan Barat. Peresmian yang berlangsung bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-1 Kodaeral XII itu dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, unsur Forkopimda, pejabat TNI-Polri, Perbakin, serta mitra strategis Kodaeral XII.

Komandan Kodaeral XII Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pembangunan Lapangan Tembak Indoor Jala Khatulistiwa merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, Perbakin, dan masyarakat. "Lapangan tembak ini tidak hanya mendukung kesiapan operasional prajurit, tetapi juga diharapkan menjadi sarana pembinaan atlet menembak serta melahirkan prestasi olahraga menembak Kalimantan Barat hingga tingkat nasional dan internasional," ujar Sawa. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, baik di lingkungan TNI Angkatan Laut maupun bagi atlet menembak di daerah. Peresmian lapangan tembak turut dirangkaikan dengan pengukuhan Kodaeral XII Shooting Club sebagai anggota Perbakin Kabupaten Mempawah, penandatanganan prasasti, penekanan sirene, pemotongan pita, peninjauan fasilitas, serta pertandingan menembak eksekutif dalam rangka HUT ke-1 Kodaeral XII. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi hadirnya Lapangan Tembak Indoor Jala Khatulistiwa. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat memperkuat pembinaan olahraga menembak di Kalimantan Barat sekaligus menjadi wujud kolaborasi antara Kodaeral XII, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Perbakin dalam meningkatkan kualitas atlet serta penyediaan sarana olahraga yang representatif.

12. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1348 / SATPOL.PP tanggal 5 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pembukaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Prov.Kalbar di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Prov.Kalbar.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 5 Agustus 2026 di mulai pukul 08.30 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat digitalisasi layanan publik melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri High-Level Meeting (HLM) yang dirangkaikan dengan soft launching penggunaan Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar pada layanan pembayaran pajak daerah lainnya serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Peluncuran Open API dan QRIS Dinamis MPM ditandai dengan penekanan tombol layar secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat yang didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Ketua DPRD Prov Kalbar, Dirut PT BPD Kalbar, Perwakilan Polda Kalbar, sebagai tanda dimulainya implementasi layanan pembayaran pajak daerah berbasis digital. Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat, serta seluruh anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi yang telah dibangun dalam mendorong transformasi digital di daerah. “Berkat kerja sama dan ikhtiar bersama, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat kini berada pada kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kolaborasi yang membanggakan, namun harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus dibuktikan dengan implementasi yang nyata di lapangan. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan penggunaan QRIS benar-benar telah diterapkan secara luas. “Tolong dicek ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya. Ria Norsan mencontohkan penerapan pembayaran digital di sejumlah restoran di DKI Jakarta yang telah menggunakan sistem barcode secara menyeluruh, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. Menurutnya, sistem serupa perlu terus dikembangkan di Kalimantan Barat agar pelayanan publik semakin efisien sekaligus meminimalkan praktik administrasi manual. “Melalui inovasi Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan yang lebih besar dalam bertransaksi. Pemerintah juga dapat menerima data penerimaan pajak secara lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Di akhir arahnya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak cepat berpuas diri atas capaian yang telah diraih. “Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN, BUMD, perbankan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

13. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1364 / SATPOL.PP tanggal 7 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelepasan Kapal Ekspor Komoditas Alumina Hydrocide dan Alumina Oxide, di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jl. Pak Kasih, No. 11, Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 7 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melepas ekspor aluminium hydroxide dan aluminium oxide milik PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Ekspor ini menandai berakhirnya hambatan pengapalan yang sempat terjadi akibat perbedaan tafsir aturan mengenai Logam Tanah Jarang (LTJ). Dudung mengatakan persoalan tersebut muncul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan larangan ekspor LTJ. Setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah memastikan larangan tersebut hanya berlaku terhadap LTJ sebagai komoditas utama. Sementara, kandungan LTJ yang hanya menjadi unsur atau mineral ikutan dalam komoditas pertambangan utama beserta produk turunannya tidak termasuk dalam ketentuan larangan ekspor tersebut. Dudung menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif Kantor Staf Kepresidenan bersama kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi diawali dengan rapat di KSP pada 27 Juli 2026. Selanjutnya, pemerintah menggelar rapat teknis

lintas instansi pada 30 Juli 2026. Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk surveyor, Bea dan Cukai, serta kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya menyamakan persepsi selama masa transisi sembari menunggu penyempurnaan regulasi.

Hasilnya, sebanyak 85 laporan surveyor yang sebelumnya tertunda akhirnya dapat diterbitkan. Dengan terbitnya dokumen tersebut, lebih dari 100 kapal ekspor yang sempat tertahan kini dapat kembali melakukan aktivitas pengapalan. "Ini memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa kegiatan ekspor dapat kembali berjalan," ujar Dudung. Menurut Dudung, penyelesaian persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekspor komoditas mineral. Komoditas yang kembali dapat diekspor mencapai hampir 400 ribu ton dengan nilai Free on Board (FOB) sekitar US\$ 124 juta atau setara sekitar Rp 2,2 triliun. Sementara itu, sekitar 80 ribu ton lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi. Dengan demikian, total komoditas yang sempat terdampak akibat persoalan tersebut mencapai sekitar 471 ribu ton. "Ini bukan hanya soal ekspor, tetapi bagaimana memastikan aktivitas industri tetap berjalan," katanya. Dudung menilai kelancaran ekspor sangat berkaitan dengan keberlangsungan operasional industri dan tenaga kerja. Menurutnya, kembali berjalannya pengapalan akan menjaga kesinambungan produksi alumina sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. "Dengan kembali berjalan ekspor, keberlanjutan produksi dapat terjaga dan ribuan tenaga kerja langsung di sektor alumina tetap terlindungi," ujarnya.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja di industri alumina. Aktivitas pertambangan, pengangkutan, pergudangan, pelabuhan, pelayaran hingga berbagai usaha pendukung juga ikut bergerak. Dudung menyebut penyelesaian persoalan ekspor tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap hambatan terhadap kegiatan ekonomi segera diselesaikan secara cepat dan konkret. Namun, penyelesaian itu tetap harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. "Kita harus

memberikan kepastian hukum, tetapi tetap sesuai dengan aturan. Ini yang menjadi prinsip dalam penyelesaian persoalan ini," katanya.

Dudung menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan kelancaran ekspor komoditas mineral Indonesia. Kalimantan Barat sendiri menjadi salah satu daerah penting dalam rantai industri alumina nasional. Karena itu, kelancaran aktivitas ekspor dinilai tidak hanya berpengaruh terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang terhubung dengan industri mineral.

14. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1372 / SATPOL.PP tanggal 10 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Pelantikan Pengurus Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menyampaikan Nota Penjelasan terkait Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Balairungsari, Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026). Dalam penyampiannya, Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa penyusunan perubahan APBD berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses perubahan APBD diawali dengan penyusunan perubahan KUA dan PPAS yang diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Menurutnya, penyusunan perubahan KUA dan PPAS menggunakan data dan informasi yang mencakup kebijakan anggaran, program prioritas beserta indikator kinerja, serta indikator pendanaan yang bersumber dari Perubahan RKPD. Hal tersebut meliputi kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam perubahan APBD, serta kebijakan perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. “Penyusunan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 tetap memperhatikan dinamika ekonomi makro nasional maupun daerah. Tahun 2026 juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029,” jelas Ria Norsan. Ia menegaskan, seluruh kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kalimantan Barat. “Visi pembangunan kita adalah terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan. Karena itu, perubahan APBD harus tetap menjadi instrumen untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Gubernur menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Kalimantan Barat pada 2026 diperkirakan tetap menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut antara lain tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kalbar pada triwulan II tahun 2026 yang mencapai 5,61 persen dan masih berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan. Adapun target indikator makro pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2026 meliputi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,19–6,17 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,75 persen, angka kemiskinan pada kisaran 5,75–6,25 persen, serta rasio Gini sebesar 0,302. “Pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan kedua mencapai 5,61 persen. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Barat masih tumbuh positif dan berada dalam kisaran yang kita targetkan,” ujar Norsan.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi Kalimantan Barat. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan inflasi pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen dan nilai tukar rupiah sekitar Rp16.800 hingga Rp17.500. Kita juga melihat sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan sebagai sektor-sektor yang akan terus mendorong perekonomian daerah,” paparnya. Gubernur menjelaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. Kebijakan tersebut tetap memperhitungkan dinamika fiskal nasional, termasuk implikasi perubahan atau pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. “Pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp5.450.221.283.795, kemudian berubah menjadi Rp5.763.262.023.504. Perubahan ini tentu menjadi bagian dari penyesuaian terhadap kondisi fiskal dan perkembangan pendapatan daerah,” terang Norsan. Ia menekankan bahwa optimalisasi pendapatan harus dilakukan tanpa mengabaikan kondisi dan kemampuan masyarakat. “Yang paling penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara baik, transparan, dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Pendapatan yang kita peroleh harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program pembangunan,” katanya.

Pada sisi belanja, kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029. Fokus belanja juga diberikan untuk memenuhi belanja wajib (mandatory spending) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada enam urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. “Belanja semula ditargetkan sebesar Rp5.700.271.283.795, kemudian berubah menjadi Rp6.210.744.018.051,63,” ungkapinya. Gubernur menegaskan,

perubahan belanja tersebut harus benar-benar diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Jangan sampai perubahan anggaran hanya dilihat dari sisi angka. Yang paling utama adalah manfaatnya. Setiap rupiah yang kita belanjakan harus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran sekaligus mendukung penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) sebesar Rp50 miliar. Gubernur menjelaskan, defisit anggaran yang semula sebesar Rp250 miliar berubah menjadi Rp447.481.994.997,63. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto. Adapun penerimaan pembiayaan sebesar Rp497.481.994.997,63 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. “Defisit anggaran semula sebesar Rp250 miliar dan berubah menjadi Rp447.481.994.997,63. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025,” jelas Norsan.

Ia menambahkan, penyertaan modal kepada Bank Kalbar juga merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan daerah. “Penyertaan modal sebesar Rp50 miliar ini kita harapkan dapat memperkuat peran Bank Kalbar dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk memberikan dukungan terhadap dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya. Menutup penyampaian, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas responsivitas dan sinergi yang telah terbangun dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. “Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas sinergi dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik,” ungkapnya. Ia berharap

pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan. “Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan keharmonisan antara unsur eksekutif dan legislatif. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.

15. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1383 / SATPOL.PP tanggal 11 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Hari Lahir Muslimat NU Ke-80 di Asrama Haji Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 11 Agustus 2026 di mulai pukul 15.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri secara langsung Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat Nahdlatul Ulama Pengurus Wilayah Muslimat NU Kalimantan Barat di Asrama Haji Kota Pontianak, Selasa (11/8). Dalam kesempatan tersebut, Khofifah bersama ribuan warga Muslimat NU se-Kalimantan Barat kembali menggaungkan seruan perdamaian dunia sekaligus menegaskan peran Muslimat NU dalam menjaga perdamaian dan merawat persaudaraan. Seruan tersebut menjadi bagian dari pesan yang disampaikan secara serentak oleh Muslimat NU dalam setiap peringatan Harlah di berbagai

daerah. “Jadi yang dilakukan di setiap Harlah Muslimat NU antara lain kita membacakan surat isinya adalah seruan perdamaian, hentikan peperangan. Surat itu di semua titik kita tunjukkan kepada PBB,” ujar Khofifah.

Khofifah yang juga Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut mengatakan, seruan perdamaian itu menjadi bentuk nyata kepedulian Muslimat NU terhadap persoalan kemanusiaan dan perdamaian dunia. Menurutnya, pesan tersebut selaras dengan tema Harlah ke-80 Muslimat NU, yakni Merawat Tradisi, Memperkuat Kemandirian, Meneduhkan Peradaban. “Perdamaian dunia adalah tujuannya kita bersama dan meneduhkan peradaban adalah jalannya untuk mencapai tujuan tersebut,” sebutnya. Ia menjelaskan, meneduhkan peradaban memiliki makna menciptakan suasana yang adem, kondusif, toleran, bijak, tidak panas dan tidak radikal. Upaya tersebut, lanjut Khofifah, dapat dilakukan dengan mengedepankan dialog, toleransi, keadilan dan kemandirian. Selain itu, penting untuk membangun persatuan dengan menyatukan, bukan memecah belah. “Kalau peradabannya sudah teduh maka konflik bisa diredam sebelum pecahnya peperangan, dan perdamaian jadi lebih mudah dijaga,” imbuhnya.

Khofifah mengatakan, Muslimat NU juga terus berupaya agar seruan perdamaian tersebut dapat disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menuturkan bahwa pihaknya melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri agar Muslimat NU mendapatkan kesempatan menyampaikan seruan tersebut secara langsung kepada PBB. “Jadi seruan damai, seruan untuk hentikan perang itu adalah seruan dari semua Muslimat di mana saja mereka Harlah. Itu yang disampaikan,” tegasnya. Menurut Khofifah, seruan perdamaian tersebut merupakan bagian dari peran Muslimat NU sebagai organisasi perempuan yang tidak hanya berfokus pada penguatan keluarga dan umat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan serta masa depan peradaban. “Muslimat NU

tidak hanya merawat tradisi dan menguatkan kemandirian umat, tetapi juga hadir meneduhkan peradaban melalui pesan-pesan damai,” tambahnya. Khofifah pun mengajak seluruh kader dan anggota Muslimat NU untuk terus menyemai kedamaian, menjaga persaudaraan serta memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat.

Ia berharap, sebagai organisasi perempuan terbesar di dunia, Muslimat NU dapat terus memperluas pesan perdamaian sehingga suara tersebut tidak hanya terdengar di tingkat nasional, tetapi juga sampai ke dunia internasional. “Dari peradaban yang meneduhkan, lahir seruan perdamaian yang didengar dunia,” tegasnya.

Ia menambahkan, seruan kepada PBB untuk menghentikan peperangan merupakan ikhtiar dan harapan agar perdamaian dunia terus diperjuangkan. Sementara itu, kerja-kerja Muslimat NU di tingkat akar rumput melalui pendidikan, UMKM, dakwah, istighosah dan salawat menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban yang teduh. Dengan demikian, pesan perdamaian tidak hanya disampaikan melalui seruan kepada dunia internasional, tetapi juga diwujudkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Penguatan keluarga, kemandirian ekonomi, pendidikan dan kehidupan keagamaan menjadi bagian dari upaya merawat persaudaraan dan mencegah munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Di kesempatan ini pula, Khofifah mengajak seluruh anggota Muslimat NU yang hadir untuk bersama-sama melantunkan salawat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengibaran Bendera Merah Putih serta menyanyikan lagu Hari Merdeka dan Garuda Pancasila.

16. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1403 / SATPOL.PP tanggal 13 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Operasi Pasar Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Gelar Pekan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pameran Fotografi dan Produk Kreatif “Collective Memori and Urban Faces”

di Halaman Galeri dan Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 13 Agustus 2026 di mulai pukul 07.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Kegiatan Operasi Pasar Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Gelar Pekan Produk Kelautan dan Perikanan, serta Pameran Fotografi dan Produk Kreatif “Collective Memory and Urban Faces” telah diselenggarakan pada 13 hingga 15 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB. Acara ini bertempat di Halaman Galeri dan Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (samping Rumah Radakng) sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rincian Kegiatan

- Waktu Pelaksanaan: 13–15 Agustus 2026
- Lokasi: Halaman Galeri dan Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Samping Rumah Radakng, Pontianak)
- Agenda Utama:
 - o Operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan pokok.
 - o Gelar pekan produk kelautan dan perikanan.
 - o Pameran fotografi kreatif dan produk ekonomi kreatif bertajuk “Collective Memory and Urban Faces” oleh Disporapar Provinsi Kalbar.

17. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1426 / SATPOL.PP tanggal 18 Agustus 2026. Melaksanakan

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Sholawat Kebangsaan Merah Putih bersama Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf dan Habib Zacky bin Ridho bin Yahya di Jl.Gajah Mada depanPasar Flamboyan Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 18 Agustus 2026 di mulai pukul 19.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Ribuan warga memadati Jalan Gajah Mada, Pontianak, Selasa malam (18/8/2026), untuk mengikuti Kalimantan Barat Bersholawat Merah Putih bersama Habib Syech Assegaf. Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut merupakan rangkaian Haul ke-115 Habib Muhammad bin Abdullah Al Muthahar sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaah dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat mulai berdatangan sejak sore. Mereka membawa bendera Merah Putih dan atribut sholawat, memadukan suasana religius dengan semangat kebangsaan. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan lantunan sholawat yang dipimpin Habib Syech Assegaf. Gubernur Ria Norsan hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina Norsan.

Dalam sambutannya, Ria Norsan mengatakan Kalbar Bersholawat Merah Putih menjadi momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat ukhuwah, dan mensyukuri kemerdekaan Indonesia. "Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul dalam suasana iman, sholawat, dan cinta tanah air. Kalbar Bersholawat Merah Putih ini merupakan wujud syukur kita dalam memperingati HUT RI ke-81.

Sholawat dan doa kita panjatkan untuk bangsa, Kalbar, serta para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan,” ujarnya. Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan, toleransi, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kalbar.

“Mari kita jaga persatuan, toleransi, dan kerukunan. Dengan sholawat, semoga Kalbar semakin berkah, aman, dan sejahtera,” katanya.

Ria Norsan juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dan ikut menjaga kegiatan berlangsung aman dan tertib. “Ini luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semua hadir membawa semangat Merah Putih. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan semakin memperkuat ukhuwah kita di Kalbar,” ujarnya.

Ia mengajak umat Islam memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus mendoakan keberkahan bagi masyarakat dan daerah. “Mudah-mudahan kegiatan silaturahmi dalam rangka haul dan kebangsaan ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan Kalbar dijadikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya. Lantunan sholawat terus menggema hingga akhir acara. Jemaah mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat sambil mengibarkan bendera Merah Putih dalam suasana kebersamaan dan semangat kemerdekaan.

18. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1421 / SATPOL.PP tanggal 15 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar dalam Memberikan Sambutan dan Membuka Kegiatan Independent Cup V Tahun 2026 di Gaia Mall Kuburaya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 15 Agustus 2026 di mulai pukul 10.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Kompetisi Liong dan Barongsai Independent Cup V Tahun 2026 di Gaia Bumi Raya City, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu, 15 Agustus 2026, digelar dengan skala internasional tahun ini, panitia menghadirkan peserta dari Malaysia dan mencatat total 26 barongsai serta 8 liong. Ketua Panitia Independent Cup V Tahun 2026, Hamdan mengatakan, pelaksanaan berskala internasional tersebut menjadi langkah awal untuk mengembangkan potensi atlet Liong dan Barongsai di Kalimantan Barat. “Memang kita laksanakan secara internasional karena harapan kita memiliki atlet-atlet yang berpotensi,” kata Hamdan.

Ia menyebut, penyelenggaraan tahun depan ditargetkan lebih besar dengan mengundang lebih banyak negara. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyambut baik pelaksanaan Independent Cup V Tahun 2026. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kompetisi tersebut sangat luar biasa. “Kami pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kegiatan Independent Cup V Tahun 2026 di Gaia Bumi Raya City Kubu Raya. Antusias masyarakat sangat luar biasa,” ujarnya. Norsan berharap kegiatan tersebut dapat dikemas lebih baik dan masuk dalam kalender event pariwisata Kalimantan Barat. “Untuk ke depan kita pasti siap membantu,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengatakan kehadiran peserta dari Malaysia membuat kompetisi Liong dan Barongsai tahun ini berstatus internasional. Ia berharap Independent Cup dapat menjadi salah satu agenda tahunan pariwisata di Kubu Raya. Ke depan, pihaknya juga berencana mendatangkan peserta dari sejumlah negara lain, seperti Thailand dan Singapura. “Harapan saya mudah-mudahan bisa masuk ke dalam kalender event pariwisata. Ke depan kita akan bawa lagi beberapa negara, seperti Thailand dan Singapura,” kata Sujiwo. Menurutnya, semakin banyak peserta dan negara yang terlibat,

maka dampaknya juga akan terasa terhadap perekonomian masyarakat Kubu Raya. “Kalau semakin ramai pesertanya, maka akan bagus pertumbuhan ekonomi di Kubu Raya,” pungkasnya.

19. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1438 / SATPOL.PP tanggal 19 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar dalam Menghadiri Undangan Kubu Raya Bershalawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf di Kantor Bupati Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 19 Agustus 2026 di mulai pukul 19.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Puluhan ribu jamaah memadati kegiatan Kubu Raya Bersholawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf. Suasana penuh khidmat dan kebersamaan mewarnai majelis sholawat yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-19 Kabupaten Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, Kubu Raya Bersholawat bukan sekadar kegiatan keagamaan, tetapi telah ditetapkan sebagai salah satu agenda dalam kalender tahunan pemerintah daerah. “Malam hari ini kita menggelar Kubu Raya Bersholawat. Puluhan ribu jamaah memenuhi majelis sholawat ini. Ini memang agenda yang kita tetapkan dalam salah satu kalender tahunan dalam rangka HUT RI dan hari ulang tahun Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia memastikan kegiatan sholawat akbar tersebut akan kembali digelar setiap tahun. Menurutnya, Kubu Raya Bersholawat menjadi

ikhtiar untuk memohon keberkahan bagi daerah dan seluruh masyarakat. “Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholawat ini Allah memberikan keberkahan untuk daerah dan masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Kemudian Allah selalu menjaga seluruh ASN dan seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya dari segalanya,” harapnya.

Jadi Motivasi untuk Pengabdian

Sujiwo juga menilai Kubu Raya Bersholawat memberikan energi spiritual sekaligus motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Ia menyebut dirinya bersama Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajaran Pemkab Kubu Raya diharapkan semakin mendalam dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. “Kegiatan ini tentunya menjadi motivasi saya, Pak Wabup, Pak Sekda dan jajaran agar kiranya pengabdian sebagai abdi negara itu semakin mendalam lagi,” katanya. Tidak hanya Kubu Raya Bersholawat, Pemkab Kubu Raya juga tengah menyusun sejumlah agenda keagamaan yang akan masuk dalam kalender kegiatan daerah. Di antaranya pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Gema Idul Fitri serta kegiatan menyambut tahun baru Islam.

Kubu Raya Ingin Jadi Rumah Bersama Semua Agama

Menariknya, Sujiwo menegaskan pemerintah daerah juga akan memberikan ruang bagi umat agama lain untuk melaksanakan agenda keagamaan mereka. Ia menyebut Pemkab Kubu Raya tengah membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama untuk menyusun kalender kegiatan lintas agama, termasuk kemungkinan agenda Natal bersama bagi umat Kristen dan Katolik serta kegiatan bagi umat Buddha. “Pemerintah Kabupaten Kubu Raya benar-benar harus menjadi pengayom, payung semua agama. Setiap agama kan pasti mempunyai agenda-agenda hari besar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini nanti akan kita sinkronisasikan dengan tokoh-tokoh agama terkait,” jelas Sujiwo. Menurutnya, keberagaman bukan menjadi pembatas, melainkan kekuatan untuk membangun kebersamaan dan keharmonisan di Kubu Raya.

Apresiasi untuk Semua yang Terlibat

Sujiwo juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan Kubu Raya Bersholawat. Apresiasi diberikan kepada Sekda, jajaran OPD, panitia, para habaib, ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, santriwan-santriwati, seluruh elemen masyarakat hingga TNI dan Polri. “TNI Polri juga luar biasa memberikan dukungan penuh, terutama Polri yang mengamankan jalannya kegiatan Kubu Raya Bersholawat,” ungkapnya. Ia berharap seluruh pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT.

20. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1465 / SATPOL.PP tanggal 24 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Menteri Kehutanan di Markas Manggala Agni Rasau Jaya Kab Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 24 Agustus 2026 di mulai pukul 11.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Daops Manggala Agni Kemenhut Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8). Rakor digelar setelah Menhut meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Rasau Jaya dan melihat proses penanganan yang dilakukan petugas di lapangan. Menhut mengatakan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari tindak

lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanganan karhutla. Menurut Menhut, seluruh upaya pemerintah diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Minggu (23/8) pukul 23.59 WIB yang disampaikan dalam rapat, jumlah hotspot di Kalimantan Barat tercatat 28 titik. Namun, Menhut mengingatkan bahwa penurunan hotspot tidak serta-merta berarti persoalan karhutla telah selesai. Saat peninjauan di Kubu Raya, misalnya, api sudah tidak terlihat tetapi asap masih keluar dari lahan gambut karena proses pembakaran dapat berlangsung di bawah permukaan tanah. “Turunnya angka hotspot tersebut tidak boleh membuat kita berleha-leha atau menjadi tidak peduli. Justru kondisi ini harus memotivasi kita untuk lebih berhati-hati. Jangan melakukan pembakaran lahan untuk keperluan land clearing, baik oleh petani, pihak swasta, maupun korporasi,” tegas Menhut. Ia menambahkan bahwa penanganan titik asap harus terus dilakukan melalui operasi darat maupun water bombing, bersamaan dengan penguatan pencegahan dan partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat operasi, Kementerian Kehutanan juga melakukan penebalan personel. Secara nasional, sebanyak 5.000 ASN Kementerian Kehutanan akan diperbantukan untuk mendukung Manggala Agni Kemenhut dan tim gabungan di enam provinsi prioritas. Sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di wilayah Kalimantan, termasuk tambahan sekitar 700 personel di Kalimantan Barat yang berasal dari Polisi Kehutanan serta UPT Kementerian Kehutanan dari berbagai daerah. Penguatan operasi darat berjalan beriringan dengan operasi udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menhut menyampaikan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG untuk memanfaatkan setiap potensi pertumbuhan awan. “Sekecil apa pun potensi awan hujan setelah tanggal 27, akan tetap kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk membantu teman-teman di darat.” Perwakilan BMKG, Erika, menjelaskan kondisi cuaca Kalimantan Barat secara umum masih kering. Kabupaten Ketapang

tercatat telah mengalami sekitar 54 hari tanpa hujan, sedangkan Kubu Raya sekitar 42 hari. OMC yang dilaksanakan pada 22–27 Agustus telah menghasilkan hujan di sejumlah lokasi dan diikuti penurunan hotspot, tetapi setelah 27 Agustus potensi cuaca diperkirakan kembali sangat kering. “Secara umum berdasarkan data, kondisinya kering, Pak,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa sekitar 4.138 personel telah diterjunkan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat, belum termasuk berbagai tambahan kekuatan yang mulai berdatangan. Kapolda Kalimantan Barat menegaskan bahwa kepolisian terus menjalankan langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum. Upaya tersebut juga dibarengi keterlibatan masyarakat melalui desa tanggap kebakaran, pengaktifan pos pengawasan, sosialisasi dari pintu ke pintu, hingga pemantauan menggunakan drone dan command center. “Situasi saat ini cukup mendesak dan memaksa kita untuk bersama-sama turun langsung dalam mencegah serta mengantisipasi kebakaran yang semakin meluas. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Kapolda. Dalam rapat, Karo Ops Polda Kalimantan Barat Kombes Pol. Marsdianto juga melaporkan bahwa hingga malam sebelumnya Polda Kalimantan Barat dan jajaran telah memproses 22 kasus terkait karhutla. Penegakan hukum menjadi bagian dari operasi terpadu bersama kegiatan pemadaman, patroli, pendinginan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Menhut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci penanganan karhutla, baik dalam mencegah pembukaan lahan dengan membakar maupun membantu upaya pemadaman. Terhadap pelaku pembakaran, khususnya pelaku besar, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu melalui Polri maupun Gakkum Kementerian Kehutanan. “Kita harus menurunkan atau meruntuhkan ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersatu. Lembaga-lembaga yang berada di daerah juga harus meleburkan ego sektoral. Kita tidak boleh mendahulukan otoritas masing-masing, tetapi

harus mendahulukan komunikasi yang efektif,” kata Menhut. Rapat koordinasi turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Barat, Kasdam XII/Tanjungpura, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas LHK, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kepala Balai Dalkarhutla Kalimantan, Kepala Balai Gakkum, serta unsur BNPB, BMKG, TNI, Polri, Manggala Agni Kemenhut, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.

Rangkaian kunjungan kerja Menhut di Kalimantan Barat dimulai dengan peninjauan lokasi karhutla di Desa Rasau Jaya Tiga Kabupaten Kubu Raya untuk melihat langsung proses pemadaman oleh Daops Manggala Agni Kemenhut dan para pihak, sebelum memimpin rapat koordinasi pengendalian karhutla di halaman Daops Manggala Agni Kemenhut Pontianak.

21. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1473 / SATPOL.PP tanggal 25 Agustus 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Maulid Nabi dan Haul Akbar Bersama Masyayikh Dalwa-Bangil di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin (Jalan Selat Panjang, Siantan Hulu).

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 25 Agustus 2026 di mulai pukul 09.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin menggelar Haul Akbar yang berlangsung penuh khidmat dan mendapat sambutan antusias dari

masyarakat setempat. Kegiatan tersebut semakin istimewa dengan hadirnya secara langsung Abuya Habib Zein bin Hasan Baharun dan Assoc. Prof. Dr. Al-Habib Segaf Baharun, M.H.I., beserta keluarga besar Dalwa (Darullughah Wadda'wah) Pasuruan. Kedatangan keluarga besar Dalwa Pasuruan disambut hangat oleh warga sekitar. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kedatangan para habaib dan tokoh yang hadir dalam rangkaian acara tersebut. Tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang dan mendoakan para ulama serta pendahulu, Haul Akbar Pondok Pesantren Darudda'wah juga dirangkaikan dengan peresmian gedung baru Pondok Pesantren Darudda'wah. Peresmian ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pesantren untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta mengembangkan dakwah di tengah masyarakat.

Pimpinan Pondok Pesantren Darudda'wah, Dr. Sarnawi Ilyas, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran para ulama dan keluarga besar Dalwa Pasuruan menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi pesantren untuk terus berkembang. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan Haul Akbar dan peresmian gedung Pondok Pesantren Darudda'wah. Kehadiran para habaib dan keluarga besar Dalwa Pasuruan menjadi kebahagiaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan pesantren," ujar Dr. Sarnawi Ilyas. Ia berharap kegiatan keagamaan seperti Haul Akbar dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. "Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Pondok Pesantren Darudda'wah semakin berkembang, semakin maju, dan semakin dikenal oleh khalayak ramai. Yang terpenting, semoga pesantren ini terus memberikan manfaat bagi umat dan menjadi tempat lahirnya generasi yang berilmu serta berakhlak," tambahnya.

Sementara itu Panitia Haul Wakman Menambahkan Kebersamaan keluarga dan dukungan masyarakat menjadi modal penting bagi Pondok Pesantren Darudda'wah untuk terus melangkah.

Momentum Haul Akbar sekaligus peresmian gedung baru tersebut diharapkan menjadi awal dari semakin kuatnya kiprah pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat. "Dengan hadirnya para ulama serta antusiasme masyarakat yang begitu besar, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pesantren, ulama, dan masyarakat," imbuhnya. Dalam menjalankan dan mengembangkan Pondok Pesantren Darudda'wah, Dr. Sarnawi Ilyas juga tidak berjalan sendiri. Ia mendapat dukungan dari saudara kandungnya, yakni KH. Ustaz Sayuti Ilyas, Ustaz Ibrahim Ilyas, dan Ustaz Fitri Adi Ilyas, yang turut membantu dalam berbagai kegiatan dan perkembangan pesantren.

22. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1522 / SATPOL.PP tanggal 2 September 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peninjauan Lokasi Karhutla Oleh Bapak Gubernur di Jl Wonodadi 2 Kab Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 2 September 2026 di mulai pukul 10.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di kawasan Parit Sekunder C, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di tengah kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Bantuan itu diberikan atas instruksi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sebagai bentuk

respons pemerintah terhadap kesulitan warga mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung di sejumlah kawasan Kubu Raya. Terbatasnya sumber air membuat sebagian masyarakat mulai kesulitan memperoleh air yang layak digunakan, terutama untuk kebutuhan memasak dan minum.

Kedatangan truk tangki pengangkut air bersih disambut antusias warga. Dengan membawa jeriken, ember hingga galon, masyarakat tampak antri secara tertib untuk mendapatkan pasokan air. Bagi warga Sekunder C, bantuan tersebut menjadi kebutuhan penting karena sumber air yang selama ini digunakan mulai terbatas akibat kemarau. Salah seorang warga, Suminem (45), menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. “Kami mewakili warga Sekunder C mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kalbar. Perhatian nyata ini sangat kami rasakan manfaatnya. Selama kemarau ini, kami kesulitan mencari air bersih untuk minum, dan bantuan air bersih ini benar-benar menjadi solusi yang kami tunggu-tunggu,” ujar Suminem di lokasi pembagian.

Menurutnya, debit air pada sejumlah sumur bor milik warga mulai menurun. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga. Hal senada disampaikan Jamal (38), petani setempat. Ia mengatakan, sebelum adanya bantuan pemerintah, warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Biasanya kami harus beli air galon untuk dimasak. Dengan adanya bantuan dari Gubernur Kalbar ini, kami sangat terbantu. Beban ekonomi sedikit berkurang dan kebutuhan air bersih keluarga tercukupi,” katanya. Selain memperhatikan kebutuhan masyarakat, Gubernur Ria Norsan juga memberikan dukungan kepada petugas dan relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla di kawasan Sekunder C. Dalam kunjungannya, gubernur menyerahkan bantuan berupa masker, makanan dan vitamin bagi tim gabungan serta relawan yang terlibat dalam upaya pemadaman

kebakaran. Sebelumnya, Ria Norsan juga turun langsung meninjau kondisi karhutla sekaligus ikut mendukung proses pemadaman yang dilakukan tim gabungan di kawasan tersebut. Kehadiran gubernur di lapangan menjadi bentuk dukungan terhadap para petugas sekaligus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian pemerintah.

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga berupaya memastikan keselamatan, kesehatan serta kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama menghadapi musim kemarau dan dampak kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan secara terpadu, mulai dari pemadaman di lapangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, dukungan kesehatan bagi masyarakat dan petugas, hingga penguatan langkah pencegahan agar karhutla tidak kembali meluas.

23. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1534 / SATPOL.PP tanggal 4 September 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Gubernur Dalam Pemadaman Karhutla Menggunakan BIOS 44 di TR 14 Rasau Jaya Kab Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 4 September 2026 di mulai pukul 07.00 WIB
– Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Dua Jenderal TNI AD yaitu Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo bersama Pangdam XII/Tanjungpura (Tpr) Mayjen TNI Novi

Rubadi Sugito turun langsung menyebarkan cairan mikroorganisme Bios 44 di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (4/9). Hal ini untuk mengoptimalkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat.

Dilansir dari keterangan Penkodam XII/Tpr, Sabtu (5/9), Kunto mengatakan penyemprotan Bios 44 ini menjadi bagian dari strategi proaktif TNI dalam mencegah munculnya titik api, khususnya di kawasan rawan gambut. Selain fokus pada upaya pemadaman darat dan udara, pendekatan biologis ini dinilai efektif untuk menekan potensi kebakaran dari dalam tanah.

Ia menjelaskan, Bios 44 merupakan racikan mikroorganisme yang berfungsi memutasi tanah maupun lahan gambut agar menjadi lebih lembap dan padat.

“Dengan tertutupnya rongga oksigen di lapisan dalam gambut, potensi munculnya sekam api yang sering memicu kebakaran hebat dapat diminimalkan,” kata Kunto.

Senada, Pangdam XII/Tpr menegaskan, selain pemadaman di lapangan, pencegahan sejak dini adalah kunci utama penanganan Karhutla.

“Pengaplikasian Bios 44 ini diharapkan mampu menutup rongga-rongga pada lahan gambut sehingga tidak mudah terbakar saat memasuki musim kemarau. Langkah ini mempertegas komitmen TNI dalam menjaga stabilitas lingkungan dan melindungi masyarakat Kalbar dari ancaman bencana asap akibat Karhutla,” ujar Novi.

24. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1557 / SATPOL.PP tanggal 10 September 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar Dalam Peninjauan Lokasi Karhutla Mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia di Desa Sungai Malaya Kec Sunai Ambawang.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 10 September 2026 di mulai pukul 17.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Baarat (Kalbar), Kamis (10/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat. Setibanya di Desa Sungai Malaya, Wapres Gibran bersama Gubernur Ria Norsan langsung menuju titik lokasi lahan yang terbakar. Wapres melihat secara langsung proses pemadaman yang dilakukan Satgas Gabungan menggunakan pompa air dan selang.

Wapres Gibran juga berdialog dengan petugas, relawan, dan masyarakat sekitar untuk mendengarkan secara langsung kondisi serta kendala yang dihadapi dalam proses pemadaman Karhutla di lapangan. Dari lokasi, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memastikan upaya pemadaman terus dilakukan hingga api benar-benar padam. Ia meminta seluruh personel yang terlibat tetap berada di lokasi dan tidak meninggalkan area sebelum kondisi dinyatakan aman. Norsan menyebut terdapat sekitar empat titik api di kawasan tersebut. Salah satunya merupakan titik dengan kobaran terbesar yang menjadi perhatian dalam penanganan. Kehadiran Wapres Gibran di lokasi menjadi bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat terhadap upaya penanganan Karhutla di Kalimantan Barat, sekaligus memastikan kondisi masyarakat terdampak mendapat perhatian. “Kami atas nama

Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang telah hadir langsung melihat kondisi Karhutla di Kalbar. Ini bentuk perhatian nyata Pemerintah Pusat kepada masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Gubernur Ria Norsan.

Desa Sungai Malaya merupakan salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan Karhutla. Sekitar 45 kepala keluarga (KK) berada di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga keselamatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam penanganan. Selain pemadaman, pemerintah bersama berbagai pihak juga terus memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak, di antaranya melalui distribusi air bersih, masker, serta layanan kesehatan. Gubernur Ria Norsan juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa, organisasi masyarakat, relawan, serta berbagai unsur masyarakat yang turut membantu penanganan dampak Karhutla. “Gotong royong seperti ini yang kita butuhkan. Pemerintah hadir, tetapi dukungan dan kepedulian masyarakat juga sangat menentukan dalam menghadapi Karhutla,” tambahnya. Berdasarkan data penanganan Karhutla, sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 38.310,86 hektare lahan terbakar di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah sehingga penanganan terus dilakukan secara terpadu dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara, termasuk patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat dan BMKG.

Dalam penanganan Karhutla, Pemprov Kalbar mengerahkan kekuatan Satgas Darat yang melibatkan unsur BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Manggala Agni, DLHK, personel BKO, Masyarakat Peduli Api, serta pihak perusahaan. Namun demikian, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan, antara lain keterbatasan sumber air, jarak lokasi kebakaran, kapasitas mesin pompa, serta kondisi jarak pandang yang dapat menghambat pelaksanaan operasi udara. Pemprov Kalbar juga terus mendorong perusahaan perkebunan untuk bertanggung jawab terhadap

lahan konsesinya serta memastikan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Gubernur menegaskan, penanganan Karhutla di Kalimantan Barat saat ini difokuskan pada tiga hal utama, yakni operasi pemadaman, pencegahan, dan penanganan dampak terhadap masyarakat.

Operasi pemadaman terus digencarkan melalui darat, udara, dan modifikasi cuaca. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli, sosialisasi larangan membakar lahan, serta penegakan hukum. Sementara penanganan dampak dilakukan melalui pembagian masker, penyediaan air bersih, dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap. Kehadiran Wakil Presiden Gibran di lokasi Karhutla diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, terpadu, dan maksimal. “Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kehadiran Bapak Wakil Presiden. Kehadiran beliau secara langsung di lapangan semakin memperkuat langkah kita dalam melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan Kalimantan Barat,” tutup Gubernur.

Usai meninjau lokasi Karhutla di Desa Sungai Malaya, Wapres Gibran bersama rombongan bertolak menuju Bandara Supadio Pontianak untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara.

25. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1605 / SATPOL.PP tanggal 22 September 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar Dalam Kegiatan Peninjauan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (PMI Prov. Kalbar) Bertempat di Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Jl. Adisucipto, Kubu Raya.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 22 September 2026 di mulai pukul 08.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Barat mengembangkan pengolahan air permukaan menjadi air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Instalasi pengolahan air tersebut berada di kawasan TMP Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Kapasitas produksinya mencapai 4.000 liter per jam atau maksimal 32 ribu liter per hari dengan operasional selama delapan jam.

Kepala Markas PMI Kalbar Ferry Budiman mengatakan, pengolahan air permukaan dilakukan sebagai alternatif setelah distribusi air dari Anjungan, Kabupaten Mempawah, menghadapi antrean dan debit yang mulai berkurang. “Selama ini distribusi menggunakan air dari Anjungan Kabupaten Mempawah. Mungkin karena banyaknya antrean dan debitnya mulai kecil, jadi kita coba berinovasi menggunakan air permukaan sebagai bahan baku untuk kita olah menjadi air bersih,” ujar Ferry, Rabu, 23 September 2026. Menurut Ferry, air permukaan yang telah melalui proses pengolahan dapat diproduksi hingga 32 ribu liter per hari dengan operasional maksimal delapan jam.

Air hasil pengolahan selanjutnya ditampung dalam tangki dan didistribusikan menggunakan truk kepada masyarakat yang membutuhkan. Ferry menegaskan, air hasil pengolahan tersebut harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi langkah PMI Kalbar yang memperluas pelayanan kemanusiaan melalui penyediaan air bersih. Menurut Krisantus, inovasi tersebut menunjukkan peran PMI dalam merespons kebutuhan masyarakat, terutama ketika terjadi keterbatasan akses terhadap air bersih. “Tetapi kali ini bukan hanya darah. PMI juga menyediakan air

bersih. Ini sebuah inovasi yang luar biasa dan patut kita apresiasi,” kata Krisantus saat meninjau instalasi pengolahan air PMI Kalbar di kawasan TMP Patria Jaya.

Krisantus mengatakan, bantuan air bersih melalui distribusi tangki penting untuk kondisi darurat. Namun, persoalan keterbatasan air bersih dan air payau di sejumlah wilayah perlu ditangani dengan sistem penyediaan air yang berkelanjutan. Ia mendorong pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dalam jangka panjang.

26. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor. 300.1 / 1615 / SATPOL.PP tanggal 23 September 2026. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip, Jl. Teuku Umar, Pontianak.

Hasil Kegiatan :

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan tanggal 23 September 2026 di mulai pukul 15.00 WIB – Selesai

2. Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pembinaan Masyarakat.

Hasil Temuan di Lapangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan di daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar, perangkat daerah terkait di kabupaten/kota, serta seluruh pelaku usaha

koperasi yang telah mendukung pelaksanaan program pengembangan koperasi di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (23/9/2026).

Menurut Krisantus, rapat koordinasi tersebut penting untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) KDKMP. Kesamaan pemahaman diperlukan mulai dari objek yang diverifikasi, dokumen yang diperiksa, kondisi fisik yang harus dipastikan, hingga tata cara pendokumentasian.

Selain itu, mekanisme pencatatan temuan, pelaporan, serta tindak lanjut atas hasil verifikasi dan validasi juga harus dipahami secara bersama agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Krisantus mengatakan, pembangunan KDKMP di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri, terutama karena kondisi geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata. Faktor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan strategi dan target pengembangan koperasi di setiap desa dan kelurahan. "Kondisi perkoperasian di Kalimantan Barat dinilai berbeda signifikan dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, kepadatan penduduk pada satu desa dapat setara dengan tingkat kecamatan di Kalimantan Barat, sehingga peluang dan probabilitas konsumen untuk berbelanja di koperasi jauh lebih tinggi. Sementara di Kalbar, terdapat wilayah dengan sebaran desa yang sangat luas namun jumlah penduduk yang terbatas," ungkap Krisantus.

Meski menghadapi tantangan geografis dan kependudukan, ia menegaskan pengembangan Koperasi Merah Putih tetap perlu didorong sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Program tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Krisantus juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara langsung di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan koperasi berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, aspek lokasi fisik koperasi juga harus menjadi perhatian. Gerai dan fasilitas koperasi diharapkan berada di lokasi yang mudah dijangkau sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. “Kegiatan kita pada hari ini memiliki arti penting. Verval bukan sekadar kegiatan administrasi dan bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan. Verval merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di lapangan benar-benar sesuai dengan ketentuan, kondisi faktual, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Lebih lanjut, Krisantus berharap Koperasi Merah Putih tidak berhenti sebagai lembaga administratif. Koperasi harus berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat dengan memperkuat kegiatan usaha, memperpendek rantai distribusi, membuka akses terhadap barang dan jasa, serta memberikan nilai tambah bagi potensi ekonomi lokal.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres tersebut menjadi landasan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana fisik KDKMP. Selain itu, telah ditetapkan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi. Melalui koordinasi, verifikasi, dan pengawasan yang kuat, Pemprov Kalbar berharap pembangunan KDKMP dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	173.920.700,-	168.075.495,-	96,63 %

Sumber data : SIPD

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2026 sebesar Rp. 173.920.700,- dan pada Triwulan III telah direalisasikan sebesar Rp. 168.075.495,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 96,63 %. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

BAB III

HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	3 Laporan	75 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 3 (tiga) laporan atau sebanyak 75 % (tujuh puluh lima) persen.

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum optimal koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperoleh data dan informasi peta potensi rawan konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi terkait terkait baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, *stakeholder* maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

BAB IV PENUTUP

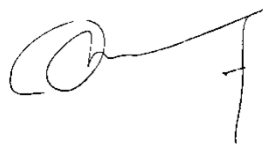
Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2026, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,


EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19820814 200604 2 009

Pontianak, 05 Oktober 2026
Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,


IMAM ASROPI, SKM, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19710913 199403 1 005

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN





SURAT PERINTAH TUGAS

NO	SPT	HARI/ WAKTU	GIAT	PERSONIL			LOKASI
1	Nomor : 300.1 / 1187 / SATPOL.PP-B Tanggal : 3 Juli 2026	Jumat, 3 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Konferensi Provinsi II Gerakan Pemuda Dayak Kalbar (Tentatif) di Hotel Harris Pontianak	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
2	Nomor : 300.1 / 1204 / SATPOL.PP-B Tanggal : 7 Juli 2026	Selasa, 7 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar Terkait Pemadaman Listrik di Kota Pontianak	SATPOL PP	12	Orang	Kab Kubu Raya
3	Nomor : 300.1 / 1208 / SATPOL.PP-B Tanggal : 8 Juli 2026	Rabu, 8 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Barisan Pemuda Melayu Terkait Pemadaman Listrik di PLN UID Adisucipto.	SATPOL PP	6	Orang	Kab Kubu Raya
4	Nomor : 300.1 / 1218 / SATPOL.PP-B Tanggal : 9 Juli 2026	Jumat, 10 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Gerakan Aksi Indonesia Asri di Masjid Mujahidin Kota Pontianak.	SATPOL PP	13	Orang	Kota Pontianak

5	Nomor : 300.1 / 1230 / SATPOL.PP-B Tanggal : 13 Juli 20	Senin, 13 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pengesahan PSHT di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
6	Nomor : 300.1 / 1240 / SATPOL.PP-B Tanggal : 14 Juli 2026	Selasa, 14 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Gubernur di Kota Pontianak.	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak
7	Nomor : 300.1 / 1248 / SATPOL.PP-B Tanggal : 15 Juli 2026	Rabu, 15 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Rapat Kerja BPABI Tahun 2026 dan Sosialisasi IP4KB (Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat) di Gedung Rapat Universitas Panca Bhakti	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
8	Nomor : 300.1 / 1256 / SATPOL.PP-B Tanggal : 16 Juli 2026	Kamis, 16 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Basudara Maluku Kalimantan Barat Masa Bhakti 2026 – 2031 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak

9	Nomor : 300.1 / 1262 / SATPOL.PP-B Tanggal : 17 Juli 2026	Sabtu, 18 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Nonton Bareng SemiFinal Piala Dunia di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	12	Orang	Kota Pontianak
10	Nomor : 300.1 / 1263 / SATPOL.PP-B Tanggal : 17 Juli 2026	Senin, 20 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Nonton Bareng SemiFinal Piala Dunia di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	14	Orang	Kota Pontianak
11	Nomor : 300.1 / 1293 / SATPOL.PP-B Tanggal : 24 Juli 20	Senin, 27 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Persatuan Supir Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	14	Orang	Kota Pontianak
12	Nomor : 300.1 / 1294 / SATPOL.PP-B Tanggal : 24 Juli 2026	Jumat, 24 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Haflatul Imtihan ke-41 Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum di Desa Sungai Enau - Kuala Mandor B, Kab. Kubu Raya.	SATPOL PP	6	Orang	Kab Kubu Raya

13	Nomor : 300.1 / 1296 / SATPOL.PP-B Tanggal : 24 Juli 2026	Sabtu, 25 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
14	Nomor : 300.1 / 1297 / SATPOL.PP-B Tanggal : 24 Juli 2026	Minggu, 26 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
15	Nomor : 300.1 / 1313/ SATPOL.PP-B Tanggal : 28 Juli 2026	Selasa, 28 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Gubernur di Kabupaten Kubu Raya.	SATPOL PP	8	Orang	Kab Kubu Raya
16	Nomor : 300.1 / 1326 / SATPOL.PP-B Tanggal : 29 Juli 2026	Rabu, 29 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
17	Nomor : 300.1 / 1335 / SATPOL.PP-B Tanggal : 31 Juli 2026	Jumat, 31 Juli 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak

			Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelantikan Pengurus PERBAKIN Pontianak.				
18	Nomor : 300.1 / 1340 / SATPOL.PP-B Tanggal : 3 Agustus 2026	Senin, 3 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pelepasan dan Pemberian Arahan kepada Peserta SSB (Sekolah Sepak Bola) Kapuas Khatulistiwa U-12 menuju Liga Top Skor (LTS) Nasional Tahun 2026 di Kantor Gubernur.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
19	Nomor : 300.1 / 1344 / SATPOL.PP-B Tanggal : 4 Agustus 2026	Selasa, 4 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Peresmian Lapangan Tembak Indoor KODAERAL XII di Lapangan Tembak KODAERAL XII, Wajok - Kab. Mempawah.	SATPOL PP	3	Orang	Kab Mempawah
20	Nomor : 300.1 / 1348 / SATPOL.PP-B Tanggal : 05 Agustus 2026	Rabu, 5 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Pembukaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Prov.Kalbar di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Prov.Kalbar.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
21	Nomor : 300.1 / 1364 / SATPOL.PP-B Tanggal : 07 Agustus 2026	Jumat, 7 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

			Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelepasan Kapal Ekspor Komoditas Alumina Hydrocide dan Alumina Oxide, di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jl. Pak Kasih, No. 11, Pontianak.				
22	Nomor : 300.1 / 1365 / SATPOL.PP-B Tanggal : 07 Agustus 2026	Sabtu, 8 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada kegiatan Budaya Satria Pembela Melayu di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	9	Orang	Kota Pontianak
23	Nomor : 300.1 / 1366 / SATPOL.PP-B Tanggal : 07 Agustus 2026	Minggu, 9 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan Pelantikan Pengurus Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
24	Nomor : 300.1 / 1372 / SATPOL.PP-B Tanggal : 10 Agustus 2026	Senin, 10 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyara terkait penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Prov Kalbar.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
25	Nomor : 300.1 / 1383 / SATPOL.PP-B Tanggal : 11 Agustus 2026	Selasa, 11 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	SATPOL PP	2	Orang	Kota Pontianak

			Masyarakat dalam Rangka Hari Lahir Muslimat NU Ke-80 di Asrama Haji Pontianak.				
26	Nomor : 300.1 / 1403 / SATPOL.PP-B Tanggal : 13 Agustus 2026	Kamis, 13 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Operasi Pasar Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Gelar Pekan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pameran Fotografi dan Produk Kreatif “Collective Memori and Urban Faces” di Halaman Galeri dan Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	2	Orang	Kota Pontianak
27	Nomor : 300.1 / 1426 / SATPOL.PP-B Tanggal : 18 Agustus 2026	Selasa, 18 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Sholawat Kebangsaan Merah Putih bersama Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf dan Habib Zacky bin Ridho bin Yahya di Jl.Gajah Mada depanPasar Flamboyan Pontianak.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
28	Nomor : 300.1 / 1421 / SATPOL.PP-B Tanggal : 14 Agustus 2026	Sabtu, 15 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar dalam Memberikan Sambutan dan Membuka Kegiatan Independent Cup V Tahun 2026 di Gaia Mall Kuburaya.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

29	Nomor : 300.1 / 1438 / SATPOL.PP-B Tanggal : 19 Agustus 2026	Rabu, 19 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar dalam Menghadiri Undangan Kubu Raya Bershalawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf di Kantor Bupati Kubu Raya.	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya
30	Nomor : 300.1 / 1374 / SATPOL.PP-B Tanggal : 10 Agustus 2026	Selasa, 11 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 di Gedung Garuda dan Aula Enggang Kantor Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
31	Nomor : 300.1 / 1459 / SATPOL.PP-B Tanggal : 21 Agustus 2026	Sabtu, 22 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Rakorda MUI Wilayah V seKalimantan di Pendopo Gubernur Provinsi Kalbar	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
32	Nomor : 300.1 / 1460 / SATPOL.PP-B Tanggal : 21 Agustus 2026	Minggu, 23 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Karnaval Budaya di Halaman Kantor Gubernur –	SATPOL PP	8	Orang	Kota Pontianak

			Museum Provinsi Kalimantan Barat.				
33	Nomor : 300.1 / 1465 / SATPOL.PP-B Tanggal : 24 Agustus 2026	Senin, 24 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Menteri Kehutanan di Markas Manggala Agni Rasau Jaya Kab Kubu Raya.	SATPOL PP	7	Orang	Kab Kubu Raya
34	Nomor : 300.1 / 1473 / SATPOL.PP-B Tanggal : 25 Agustus 2026	Selasa, 25 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Acara Maulid Nabi dan Haul Akbar Bersama Masyayikh Dalwa-Bangil di Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin (Jalan Selat Panjang,Siantan Hulu)	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak
35	Nomor : 300.1 / 1478 / SATPOL.PP-B Tanggal : 26 Agustus 2026	Rabu, 26 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh BPM dan Aliansi Mahasiswa di Kota Pontianak	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak

36	Nomor : 300.1 / 1490 / SATPOL.PP-B Tanggal : 27 Agustus 2026	Kamis, 27 Agustus 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Masyarakat Kalbar Menggugat di Kantor DPRD Prov Kalimantan Barat.	SATPOL PP	7	Orang	Kota Pontianak
37	Nomor : 300.1 / 1522 / SATPOL.PP-B Tanggal : 2 September 2026	Rabu, 2 September 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Peninjauan Lokasi Karhutla Oleh Bapak Gubernur di Jl Wonodadi 2 Kab Kubu Raya.	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya
38	Nomor : 300.1 / 1526 / SATPOL.PP-B Tanggal : 3 September 2026	Kamis, 3 September 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Aksi Unjuk Rasa Oleh Fomda di Bandara Supadio Pontianak.	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya
39	Nomor : 300.1 / 1534 / SATPOL.PP-B Tanggal : 4 September 2026	Jumat, 4 September 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kerja Gubernur Dalam Pemadaman Karhutla	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya

			Menggunakan BIOS 44 di TR 14 Rasau Jaya Kab Kubu Raya				
40	Nomor : 300.1 / 1557 / SATPOL.PP-B Tanggal : 10 September 2026	Kamis, 10 September 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar Dalam Peninjauan Lokasi Karhutla Mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia di Desa Sungai Malaya Kec Sunai Ambawang.	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya
41	Nomor : 300.1 / 1605 / SATPOL.PP-B Tanggal : 22 September 2026	Selasa, 22 September 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar Dalam Kegiatan Peninjauan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (PMI Prov. Kalbar) Bertempat di Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Jl. Adisucipto, Kubu Raya.	SATPOL PP	5	Orang	Kab Kubu Raya
42	Nomor : 300.1 / 1615 / SATPOL.PP-B Tanggal : 23 September 2026	Rabu, 23 September 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Giat Gubernur Kalbar Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) Tahun 2026 di Hotel Golden Tulip, Jl. Teuku Umar, Pontianak.	SATPOL PP	4	Orang	Kota Pontianak

43	Nomor : 300.1 / 1620 / SATPOL.PP-B Tanggal : 24 September 2026	Kamis, 24 September 2026	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Solmadapar dan SPI Dalam Memperingati Hari Tani di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalbar.	SATPOL PP	3	Orang	Kota Pontianak
----	---	--------------------------	---	-----------	---	-------	----------------